

Katalog : 4102004.3325

# INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT KABUPATEN BATANG 2018



**BADAN PUSAT STATISTIK  
KABUPATEN BATANG**

# INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT KABUPATEN BATANG 2018



**BADAN PUSAT STATISTIK  
KABUPATEN BATANG**

INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT  
KABUPATEN BATANG

ISBN :  
Katalog : 4102004.3325  
No. Publikasi : 33250.1821  
Ukuran Buku : 18,2 cm X 25,7 cm  
Jumlah Halaman : x + 72 halaman

Naskah : Seksi Neraca Wilayah dan Analisis

Penyunting : Seksi Neraca Wilayah dan Analisis

Gambar Kulit : Seksi Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik

Diterbitkan oleh : © Badan Pusat Statistik Kabupaten Batang

Dicetak oleh : Biru Offset

INDIKATOR **KESEJAHTERAAN**  
**RAKYAT**  
KABUPATEN BATANG  
**2017**

<https://batangkab.bps.go.id>

## **PENYUSUN**

Pengarah : Tina Wahyufitri, S.Si, M.Si  
Penanggung Jawab : Sri Winarsih, S.Si, M.Ec.Dev  
Editor : Sri Winarsih, S.Si, M.Ec.Dev  
Penulis : Setiawan Budi Santoso, S.ST

Retabulasi : BPS Kab. Batang  
Penyusun : BPS Kab. Batang

# KATA PENGANTAR

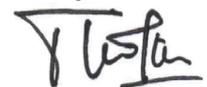
---

Publikasi **Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Batang 2017** merupakan publikasi tahunan Badan Pusat Statistik Kabupaten Batang yang menyajikan data tentang tingkat perkembangan kesejahteraan rakyat dari waktu ke waktu. Istilah kesejahteraan mencakup berbagai aspek kehidupan yang sangat luas dan tidak semuanya dapat diukur. Data yang digunakan bersumber dari data primer hasil survei Badan Pusat Statistik (BPS) yang meliputi Survei Sosial Ekonomi Nasional dan Survei Angkatan Kerja Nasional serta data dari instansi lain di luar BPS.

Publikasi ini menyajikan statistik dan indikator kesejahteraan rakyat yang diharapkan dapat digunakan sebagai dasar perencanaan maupun evaluasi terhadap upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat. Statistik yang dicakup antara lain meliputi aspek kependudukan, kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, taraf dan pola konsumsi, perumahan, kemiskinan, serta sosial lainnya. Dengan demikian, **Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Batang 2017** diharapkan mampu menjembatani penyedia dan pengguna data.

Kepada semua pihak yang telah secara aktif berperan dalam penyusunan publikasi ini, disampaikan terima kasih dengan tulus. Saran untuk perbaikan publikasi sangat diharapkan demi penyajian yang lebih baik di masa mendatang kepada segenap penggunanya.

Batang, Desember 2018  
**Kepala Badan Pusat Statistik  
Kabupaten Batang**



Tina Wahyufitri, S.Si, M.Si

# DAFTAR ISI

## DAFTAR ISI

Katalog .....	ii
Tim Penyusun.....	iii
Kata Pengantar.....	iv
Daftar Isi.....	vi
Daftar Tabel.....	vii
Daftar Gambar.....	ix
Bab 1 Kependudukan.....	1
Bab 2 Kesehatan dan Gizi.....	13
Bab 3 Pendidikan .....	21
Bab 4 Ketenagakerjaan .....	32
Bab 5 Taraf dan Pola Konsumsi .....	45
Bab 6 Perumahan .....	52
Bab 7 Kemiskinan.....	59
Bab 8 Kesimpulan .....	62
Daftar Pustaka .....	66
Lampiran.....	69

Tabel 1.1	Jumlah, Laju Pertumbuhan Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Kabupaten Batang, 2013-2017 .....	3
Tabel 1.2	Kepadatan Penduduk Kabupaten Batang, Tahun 2013-2017 .....	4
Tabel 1.3	Komposisi Penduduk dan Angka Beban Ketergantungan, 2013-2017 .....	7
Tabel 1.4	Persentase Wanita Umur 10+ Tahun Pernah Kawin Menurut Usia Perkawinan Pertama, 2016 dan 2017 .....	8
Tabel 1.5	Persentase Wanita Berumur 15-49 Tahun dan Kawin yang sedang Menggunakan Alat/Cara Kontrasepsi Menurut Alat/Cara Kontrasepsi yang Digunakan, Kab. Batang 2016 dan 2017 ...	9
Tabel 2.1	Angka Kesakitan dan Rata-rata Lamanya Sakit, 2016 dan 2017 .....	15
Tabel 2.2	Persentase Anak Usia kurang dari 2 tahun yang Pernah Disusui dan Lamanya Disusui, Kab. Batang 2016 dan 2017 .....	16
Tabel 2.3	Persentase Anak Balita (0-59 Bulan) yang Pernah Diimunisasi Menurut Jenis Imunisasi, 2016 dan 2017 .....	18
Tabel 2.4	Persentase Penduduk yang Berobat Jalan Menurut Tempat Berobat Kabupaten Batang 2016 dan 2017 .....	19
Tabel 3.1	Rata-Rata Lama Sekolah (tahun) dan Harapan Lama Sekolah (Tahun), 2016 – 2017 .....	24
Tabel 3.2	Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas menurut Jenjang Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, 2016 dan 2017 .....	25
Tabel 3.3	Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas menurut Jenis Kelamin dan Jenjang Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, 2017 .....	27
Tabel 3.4	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Usia Sekolah dan Jenis Kelamin, 2016 dan 2017 .....	28
Tabel 3.5	Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin, 2016 -2017..	29
Tabel 3.6	Perkembangan Rasio Murid-Guru, Guru-Sekolah 2016/2017 - 2017/2018 .....	31
Tabel 4.1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Tingkat Pengangguran Terbuka, 2016-2017 .....	34
Tabel 4.2	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Tingkat Pendidikan, 2016-2017 .....	36
Tabel 4.3	Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Kelompok Lapangan Usaha, 2016 - 2017 .....	38
Tabel 4.4	Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Status Pekerjaan, 2015 – 2017 .....	39
Tabel 4.5	Persentase Penduduk Usia 15 Tahun Keatas yang Bekerja Menurut Jumlah Jam Kerja Seluruhnya Selama Seminggu, 2015 - 2017 .....	41
Tabel 4.6	Persentase Pekerja Anak Usia 10 - 17 Tahun, 2016 – 2017 .....	43
Tabel 4.7	Persentase Pekerja Anak Menurut Kelompok Lapangan Usaha, 2015 - 2017 .....	43

Tabel 5.1	Rata -rata Pengeluaran per Kapita Menurut Jenis Pengeluaran, 2016 dan 2017 .....	46
Tabel 5.2	Rata - rata Pengeluaran untuk Makanan per Kapita Sebulan Menurut Golongan Pengeluaran per Kapita dan Jenis Komoditas (Rupiah), 2016 dan 2017 .....	47
Tabel 5.3	Rata - rata Pengeluaran untuk Bukan Makanan per Kapita Sebulan Menurut Kelompok Pengeluaran per Kapita dan Daerah Tempat Tinggal (Rupiah), 2016 dan 2017 .....	48
Tabel 5.4	Rata-rata Konsumsi Kalaori per Kapita sehari menurut Komoditas Makanan dan Kelompok Pengeluaran, 2017 .....	49
Tabel 5.5	Konsumsi Energi dan Protein per Kapita per Hari Menurut Daerah Tempat Tinggal 2015 - 2017 .....	51
Tabel 6.1.	Rumah Tangga Menurut Beberapa Indikator Kualitas Perumahan, 2015 – 2017 .....	54
Tabel 6.2.	Persentase Rumah Tangga Menurut Luas Lantai per Kapita, 2015 – 2017 .....	55
Tabel 6.3.	Persentase Rumah Tangga Menurut Beberapa Fasilitas Perumahan , 2015 – 2017 .....	56
Tabel 6.4.	Persentase Rumah Tangga Menurut Status Kepemilikan Rumah Tinggal, 2015– 2017 .....	58
Tabel 7.1	Jumlah Penduduk Miskin dan Persentase Penduduk Miskin, 2015 - 2018 .....	60
Tabel 7.2	Garis Kemiskinan, Indeks Kedalaman Kemiskinan, dan Indeks Keparahan Kemiskinan, 2016-2018 (Rp/Kapita/Bulan) .....	60

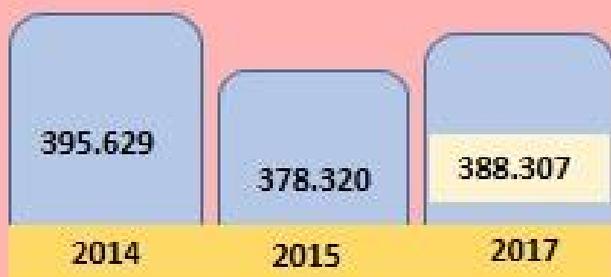
DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Rata-rata Pertumbuhan Kepadatan Penduduk Kabupaten Batang 2013 – 2017 (persen)  
..... 5

<https://batangkab.bps.go.id>

# DATA KETENAGAKERJAAN KABUPATEN BATANG TAHUN 2017

## Angkatan Kerja



Angkatan kerja  
388.307 orang

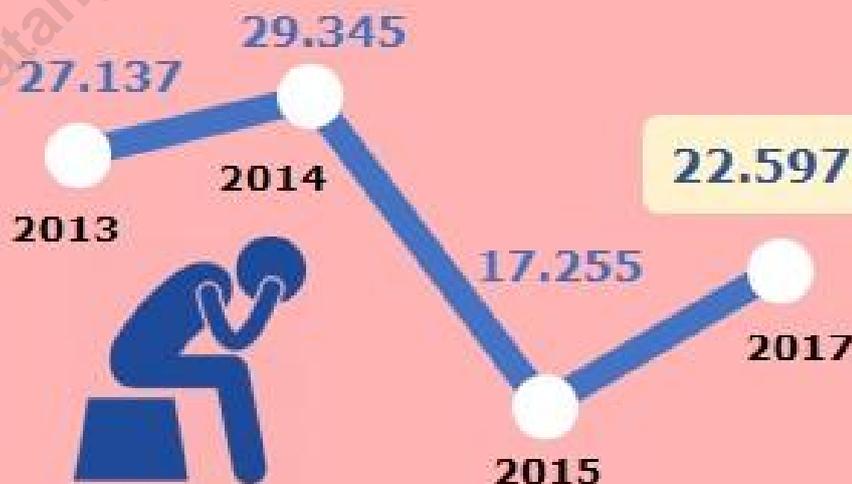
adalah penduduk usia kerja  
(15 tahun ke atas) yang  
bekerja, untuk sementara  
tidak bekerja  
atau pengangguran

## Pengangguran Terbuka

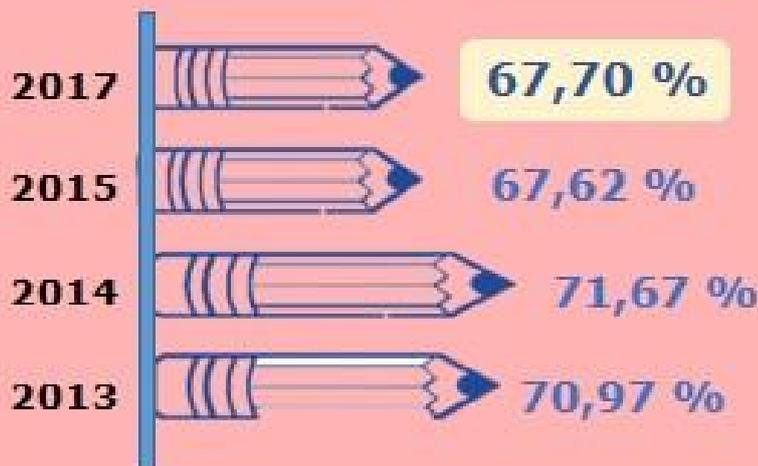
### Penganggur terbuka

Mereka yang:

1. tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan.
2. tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha.
3. tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan.
4. sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja.



## Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja





# BAB 1 KEPENDUDUKAN

Penduduk menjadi objek sekaligus subjek dalam pembangunan, oleh karena itu isu kependudukan merupakan isu yang menarik untuk dicermati. Jumlah penduduk yang tinggi telah menjadi perhatian dunia dengan berbagai teori dan penelitian. Perkembangan terakhir dewasa ini, dalam teori Neo-Malthusian yang banyak dilaksanakan di berbagai negara, pembatasan jumlah penduduk dilakukan dengan menggunakan alat kontrasepsi. Urgensi dari pengendalian jumlah penduduk ini untuk mengimbangi pemenuhan kebutuhan penduduk seperti sandang, pangan, papan, dan kebutuhan akan pendidikan dan kesehatan yang layak. Hal ini dituangkan oleh pemerintah Kabupaten Batang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005-2025 dalam mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, cerdas, sehat, serta berbudaya dengan salah satu fokusnya yakni peningkatan dan pengembangan sistem pengendalian laju pertumbuhan penduduk, pengaturan persebarannya melalui fasilitas program Keluarga Berencana (KB) dan transmigrasi dan peningkatan kualitas keluarga.

Pemenuhan kebutuhan hidup yang tidak tercapai dikhawatirkan akan menimbulkan berbagai masalah yang dapat mengganggu kesejahteraan penduduk. Penyediaan pangan yang tidak mencukupi dapat menimbulkan terjadinya kelaparan dan dapat meningkatkan jumlah kematian penduduk. Selain itu, ketersediaan pemukiman yang tidak mencukupi dapat mengakibatkan munculnya pemukiman-pemukiman yang tidak layak huni akibat sempitnya lahan untuk pemukiman seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk. Masalah lain yang dapat muncul di antaranya terjadinya gangguan keamanan akibat maraknya aksi tindakan kriminalitas, menurunnya tingkat kesehatan masyarakat akibat sarana kesehatan dan lingkungan yang kurang memadai, dan rendahnya kualitas sumber daya manusia.

Selain tingkat pertumbuhan penduduk, masalah komposisi penduduk dan

ketimpangan distribusi penduduk juga menjadi masalah serius yang harus segera ditangani oleh pemerintah. Kebijakan pemerintah terkait masalah kependudukan baik dalam hal kuantitas maupun kualitas penduduk harus terus dilaksanakan dalam upaya memperbaiki kualitas hidup masyarakat sehingga kesejahteraan hidup masyarakat dapat ditingkatkan.

## **JUMLAH, LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUK DAN RASIO JENIS KELAMIN**

Jumlah penduduk Kabupaten Batang pada tahun 2017 berdasarkan Proyeksi Penduduk Kabupaten Batang 2010-2020 tercatat sebanyak 756.079 jiwa. Memperhatikan laju pertumbuhan penduduk pertahun periode 2013-2017 maka Pemerintah Kabupaten Batang patut berbangga karena data laju pertumbuhan penduduk pertahun mengalami penurunan. Tahun 2013 penduduk Kabupaten Batang yaitu sebesar 729.591 jiwa, dan tahun 2017 bertambah menjadi sebanyak 756.079 jiwa. Secara persentase maka laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Batang tahun 2013 yaitu sebesar 0,97 persen, tahun 2017 menjadi sebesar 0,85 persen.

Dilihat berdasarkan berdasarkan jenis kelamin, jumlah penduduk laki-laki tahun 2013, yaitu mencapai sebesar 364.384 jiwa dan perempuan sebesar 365.207 jiwa, dengan rasio jenis kelamin yaitu sebesar 99,77. Sedangkan jumlah penduduk laki-laki tahun 2017 yaitu sebesar 377.492 jiwa dan perempuan sebesar 378.587 jiwa dengan rasio jenis kelamin 99,71.

Pertumbuhan penduduk laki-laki periode tahun 2013-2017 yaitu 0,89 sedangkan pertumbuhan penduduk perempuan pada periode yang sama yaitu 0,90. Rasio jenis kelamin pada periode tahun 2013-2017 mengalami penurunan 0,06 poin sedangkan pertumbuhan penduduk pada periode yang sama turun menjadi sebesar 0,12 poin.

**Tabel 1.1. Jumlah, Laju Pertumbuhan Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Kabupaten Batang, 2013-2017**

Tahun	Jumlah Penduduk	Laju Pertumbuhan	Rasio Jenis Kelamin
(1)	(2)	(3)	(4)
2013	729.591	0,97	99,77
2014	736.497	0,95	99,74
2015	743.090	0,9	99,75
2016	749.720	0,89	99,74
2017	756.079	0,85	99,71

Sumber:Proyeksi Penduduk Kabupaten Kabupaten Batang 2010-2020

Bila dilihat komposisi penduduk menurut jenis kelamin penduduk laki-laki dan perempuan, rasio jenis kelamin penduduk Kabupaten Batang pada tahun 2017 sebesar 99,71, ini berarti bahwa setiap 100 penduduk perempuan berbanding dengan 99 penduduk laki-laki. Dengan kata lain, jumlah penduduk perempuan di Kabupaten Batang lebih banyak dari pada jumlah penduduk laki-laki.

## PERSEBARAN DAN KEPADATAN PENDUDUK

Salah satu persoalan yang terkait dengan kependudukan yang masih harus dihadapi oleh Kabupaten Batang yaitu masalah ketimpangan distribusi penduduk. Distribusi penduduk yang tidak merata menimbulkan masalah pada kepadatan penduduk dan tekanan penduduk disuatu wilayah. Ada kecamatan yang mempunyai jumlah penduduk yang besar, dikecamatan lain masih ada kecamatan yang hanya dihuni oleh jumlah penduduk yang relatif sedikit. Hal ini sangat berpengaruh pada kondisi masyarakat setempat.

Di satu sisi, wilayah dengan jumlah penduduk yang besar akan dihadapkan pada persoalan meningkatnya jumlah pengangguran karena tidak memadainya penyediaan lapangan pekerjaan, permasalahan kebutuhan lahan untuk pemukiman, serta tidak

memadainya akses fasilitas pendidikan dan kesehatan serta masalah-masalah sosial lainnya. Disisi lainnya, wilayah dengan jumlah penduduk yang relatif sedikit akan memunculkan persoalan optimalisasi sumberdaya alam terkait dengan kekurangan tenaga kerja padahal wilayah tersebut memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah.

**Tabel 1.2. Kepadatan Penduduk Menurut Tahun di Kab. Batang, Tahun 2013-2017**

Tahun	Jumlah Penduduk (jiwa)	Luas Wilayah (km)	Kepadatan (Jiwa/km <sup>2</sup> )
(1)	(2)	(3)	(4)
2013	729.591	788,64	925
2014	736.497	788,64	934
2015	743.090	788,64	942
2016	749.720	788,64	951
2017	756.079	788,64	959

Sumber : Proyeksi Penduduk Kabupaten Batang 2010-2020

Kepadatan penduduk Kabupaten Batang tahun 2017 yaitu 925 jiwa per kilometer persegi, kemudian meningkat menjadi 934 jiwa per kilometer persegi tahun 2014, dan meningkat lagi menjadi 959 jiwa per kilometer persegi. Pertumbuhan kepadatan penduduk periode tahun 2013-2017 yaitu sebesar 3,68 persen atau 34 jiwa per kilo meter persegi.

**Gambar 1.1 Rata-rata Pertumbuhan Kepadatan Penduduk Di Kabupaten Batang 2013-2017 (Persen)**



Perkembangan kepadatan penduduk selama 2013-2017 menunjukkan angka pertumbuhan yang positif. Namun jika diamati perkembangan pertumbuhan kepadatan penduduk tahun 2013 memiliki laju paling tinggi yaitu sebesar 0,96 persen selama periode tersebut. Kemudian diikuti tahun 2014 yaitu sebesar 0,95 persen, dan laju pertumbuhan kepadatan penduduk terendah yaitu 0,85 persen pada tahun 2017. Apabila diamati tren laju pertumbuhan kepadatan penduduk pada periode tersebut di atas kecenderungannya mengalami penurunan seiring dengan sebaran penduduk makin merata.

## ANGKA BEBAN KETERGANTUNGAN

Angka Beban Ketergantungan (*dependency ratio*) merupakan salah satu indikator demografi yang penting. Semakin tinggi persentase angka beban ketergantungan menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif

untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Sedangkan persentase angka beban ketergantungan yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.

Dampak keberhasilan pembangunan kependudukan juga dapat dilihat pada perubahan komposisi penduduk menurut umur seperti tercermin pada semakin rendahnya angka beban ketergantungan. Hal ini disebabkan dengan semakin kecilnya angka beban ketergantungan akan memberikan kesempatan yang semakin besar bagi penduduk usia produktif untuk meningkatkan kualitas dirinya. Selama periode 2013-2017 angka beban ketergantungan setiap tahun cenderung mengalami penurunan. Pada tahun 2013 angka beban tanggungan Kabupaten Batang yaitu sebesar 46,25 persen. Hal ini berarti bahwa dari 100 penduduk usia produktif menanggung sekitar 46 penduduk usia tidak produktif. Rasio ketergantungan Kabupaten Batang terus mengalami penurunan dari tahun ke tahun dan pada tahun 2017 angka beban ketergantungan penduduk berada pada posisi 45,13 persen. Artinya, setiap 100 penduduk produktif masih menanggung beban 45 penduduk tidak produktif (penduduk dibawah umur 15 tahun dan 65 tahun keatas).

Rasio ketergantungan yang terus cenderung menurun belakangan ini diperkirakan akan mencapai titik terendah pada periode 2020-2030. Pada periode itu akan terdapat peluang lebih besar untuk melakukan investasi manusia guna mendorong produksi. Hal ini disebut sebagai fenomena Bonus Demografi. Namun perlu diketahui bahwa disatu sisi mereka dapat mendorong ekonomi untuk tumbuh jika sebagian besar dari mereka bekerja tetapi disisi lain mereka dapat menciptakan instabilitas sosial dan politik jika diantara mereka banyak yang tidak bekerja. Mereka dikatakan usia produktif tapi tidak dapat memanfaatkan tenaganya karena tidak terserap dipasar kerja.

**Tabel 1.3 Komposisi Penduduk dan Angka Beban Ketergantungan, 2013-2017**

Tahun	0-14 tahun	65+ tahun	15-64 tahun	Jumlah	Angka Beban Ketergantungan (Jiwa)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2013	185.922	44.801	498.868	729.591	46,25
2014	185.378	46.253	504.866	736.497	45,88
2015	184.794	47.869	510.427	743.090	45,58
2016	184.173	49.642	515.905	749.720	45,32
2017	183.518	51.578	520.983	756.079	45,13

Sumber : Proyeksi Penduduk Kabupaten Batang 2010-2020

Menurunnya angka beban ketergantungan diikuti pula dengan menurunnya proporsi penduduk usia muda (0-14 tahun) sebagai dampak dari menurunnya laju pertumbuhan penduduk. Tabel 1.3 menunjukkan bahwa pada tahun 2013 ada sebanyak 25,48 persen penduduk yang berusia muda (0-14 tahun). Hingga tahun 2017 proporsi penduduk usia 0-14 tahun turun menjadi 24,27 persen.

Struktur umur penduduk Kabupaten Batang masih didominasi oleh penduduk usia produktif mencapai 68,38 persen pada tahun 2013 dan terus meningkat setiap tahunnya hingga menjadi 68,91 persen pada tahun 2017. Hal ini menunjukkan bahwa penduduk usia produktif di Kabupaten Batang menjadi sangat potensial sebagai modal dasar yang besar untuk pembangunan. Sementara itu, proporsi penduduk usia lanjut (65 tahun ke atas) semakin bertambah dari 6,14 persen pada tahun 2013 menjadi 6,82 persen pada tahun 2017.

## WANITA MENURUT USIA PERKAWINAN PERTAMA

Salah satu persoalan penduduk yang dapat memicu tingginya penambahan jumlah penduduk yaitu tingginya angka kelahiran disuatu daerah. Banyaknya kelahiran yang terjadi pada seorang wanita dapat dipengaruhi oleh masa reproduksinya. Semakin panjang masa reproduksi seorang wanita, kemungkinan semakin banyak anak yang dilahirkan.

Semakin muda usia seseorang saat melaksanakan perkawinan pertama maka akan semakin panjang masa reproduksinya.

Terdapat beberapa sumber mengenai batasan usia minimal seorang wanita untuk melakukan perkawinan pertama. Menurut Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 pada pasal 7 ayat (1), syarat menikah untuk perempuan harus sudah berusia minimal 16 tahun, sedangkan menurut Undang-Undang Perlindungan Anak usia minimal untuk menikah yaitu sudah berumur 18 tahun. Menurut Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) usia pernikahan pertama bagi seseorang idealnya adalah 21-25 tahun.

Berdasarkan hasil Susenas tahun 2017, persentase wanita yang melakukan perkawinan pertama setelah 24 tahun mengalami penurunan di wilayah perkotaan. Sejalan dengan hal tersebut, persentase wanita yang melakukan perkawinan pertama pada usia sebelum 24 tahun ke atas mengalami peningkatan. Hal ini merupakan indikasi bahwa masa reproduksi penduduk wanita di perkotaan mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya. Pola yang sama juga terjadi di perdesaan, masa reproduksi wanita di perdesaan mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2016, kecuali pada umur perkawinan pertama kelompok umur 19-24 tahun di perdesaan yang kecenderungannya mengalami penurunan yaitu 44,71 persen tahun 2016 menjadi sebesar 38,21 persen tahun 2017.

**Tabel 1.4 Persentase Wanita Umur10+ Tahun Pernah Kawin Menurut Usia Perkawinan Pertama, 2016 dan 2017**

Umur Perkawinan Pertama	Perkotaan		Perdesaan		Perkotaan+Perdesaan	
	2016	2017	2016	2017	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
< 17	8,27	10,55	14,10	23,49	11,76	18,00
17-18	14,11	26,20	17,81	24,88	16,32	25,44
19-24	44,98	49,22	44,71	38,21	44,82	42,89
25+	32,64	14,02	23,38	13,42	27,11	13,68

Sumber : Susenas 2017

Fenomena perkawinan pertama dibawah usia 17 tahun mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2016 baik dipertanian dan di perdesaan patut menjadi perhatian karena konsep perkawinan berbeda dengan pernikahan. Fenomena perkawinan meningkat pada usia 16 tahun ke bawah perlu dikaji ulang apakah melalui tahapan pernikahan atau tidak. Jika ternyata tidak, maka fenomena tersebut menjadi indikasi maraknya pergaulan bebas dikalangan remaja.

## PENGUNAAN ALAT/CARA KB

Program Keluarga Berencana (KB) merupakan salah satu program pemerintah yang bertujuan untuk menekan laju pertumbuhan penduduk, mengurangi angka kelahiran anak dan kematian ibu. Program KB dilakukan dengan penggunaan alat kontrasepsi/KB yang berbagai jenis/macamnya. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) selaku instansi pemerintah yang menangani program KB ini mengharapkan cakupan akseptor KB terus meningkat. Terutama untuk kepesertaan KB dengan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) seperti IUD dan Implant. Dengan cakupan KB yang meningkat, diharapkan laju pertumbuhan penduduk bisa dikendalikan lebih baik lagi.

**Tabel 1.5. Persentase Wanita Berumur 15-49 Tahun dan Kawin yang Sedang Menggunakan Alat/Cara Kontrasepsi Menurut Alat/Cara Kontrasepsi yang Digunakan, Kabupaten Batang 2016 dan 2017**

Alat/Cara KB	Tahun	
	2016	2017
(1)	(2)	(3)
Sterilisasi Wanita/Tubektomi/MOW	6,24	4,28
Sterilisasi Pria/Vasektomi/MOP	1,08	1,18
IUD/AKDR/Spiral	5,27	2,92
Suntikan	53,51	60,6
Susuk KB/Implan	9,09	10,4
Pil	21,93	19,14
Kondom /Karet KB	1,52	0,37
Tradisional	1,37	1,11

Sumber : Diolah dari Hasil Susenas

Berdasarkan hasil Susenas tahun 2016-2017, persentase wanita berumur 15-49 tahun yang berstatus kawin yang sedang menggunakan alat/cara KB mengalami sedikit penurunan baik di perkotaan maupun pedesaan. Penurunan persentase akseptor KB ini perlu dicermati oleh pemerintah Kabupaten Batang sehingga tidak menjadi tren yang terus menurun setiap tahunnya. Jika dibandingkan dengan tahun 2016 wanita berumur 15-49 tahun yang berstatus kawin yang sedang menggunakan kontrasepsi yaitu sebesar 65,15 persen turun 3,89 persen, pada tahun 2017 sehingga menjadi sebesar 61,25 persen .

Seseorang mempunyai pilihan untuk menggunakan jenis alat/cara KB tertentu dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain faktor keamanan, frekuensi pemakaian dan efek samping, terjangkau harganya, cara penggunaan yang dianggap paling praktis, efisien, minim resiko kegagalan dan resiko efek samping terhadap kesehatan pemakai dan memberikan kenyamanan bagi penggunanya.

Berbagai macam alat/cara KB digunakan oleh pasangan usia subur Kabupaten Batang namun yang paling banyak peminatnya adalah penggunaan alat KB suntikan dan pil yang bersifat jangka pendek. Pil dan suntik termasuk alat KB Non-MKJP (tidak termasuk Metode Kontrasepsi Jangka Panjang) yang rawan putus dalam penggunaannya. Kepala BKKBN menyatakan bahwa untuk menekan laju pertumbuhan penduduk, penggunaan MKJP akan lebih efektif. Penggunaan metode suntikan menjadi persentase terbesar penggunaan alat KB kemudian diikuti penggunaan pil KB. Pada tahun 2016 penggunaan suntikan mencapai 53,51 persen dan mengalami peningkatan pada tahun 2017 menjadi sebesar 60,6 persen. Penggunaan pil mengalami sedikit penurunan dari 21,93 persen pada tahun 2016 menurun menjadi sebesar 19,14 persen pada tahun 2017.

Berdasarkan daerah tempat tinggal, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap alat kontrasepsi jangka panjang daerah perkotaan lebih tinggi dibandingkan perdesaan. Gambaran ini tampak dari persentase pemakaian alat kontrasepsi jangka panjang di daerah perkotaan lebih besar. Menurut hasil penelitian Balitbang BKKBN, banyak faktor yang mempengaruhi penggunaan jenis alat kontrasepsi antara lain tingkat pendidikan, umur, dan jumlah anak yang dimiliki.

Penggunaan alat/cara KB jangka panjang diantaranya terdapat MOW/Tubektomi, MOP/Vasektomi dan AKDR/IUD/Spiral. Ketiga jenis MKJP ini yang paling diminati adalah AKDR/IUD/SPIRAL baik di wilayah perkotaan maupun pedesaan. Penggunaan alat/cara AKDR/IUD/Spiral di daerah perkotaan persentase lebih tinggi dibandingkan daerah pedesaan pada tahun 2016. Sedangkan pada tahun 2017 untuk wilayah perkotaan lebih kecil dibandingkan pedesaan. Penggunaan alat/cara AKDR/IUD/Spiral tahun 2016 di daerah perkotaan sebesar 6,35 persen dan dipedesaan sebesar 4,60 persen, dan untuk tahun 2017 wilayah pedesaan sedikit lebih tinggi yaitu 3,20 persen dan di perkotaan hanya sebesar 2,47 persen. Cara KB dengan MOW/Tubektomi dan MOP/Vasektomi nampaknya belum begitu populer dikalangan masyarakat, terutama di pedesaan namun mulai dikenal dan digunakan.





## BAB 2

# KESEHATAN & GIZI

Tingkat kesehatan merupakan indikator penting untuk menggambarkan mutu pembangunan manusia suatu wilayah. Semakin sehat kondisi suatu masyarakat, maka akan semakin mendukung proses dan dinamika pembangunan ekonomi suatu negara/wilayah semakin baik, khususnya dalam meningkatkan tingkat produktivitas. Pemerintah Kabupaten Batang menuangkan program kesehatan dalam RPJPD 2005-2025 dan dalam pelaksanaannya pemerintah sudah kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat khususnya memberikan kemudahan akses pelayanan publik bidang kesehatan seperti puskesmas yang sasaran utamanya menurunkan tingkat angka kesakitan masyarakat, menurunkan Angka Kematian, menurunkan prevalensi gizi buruk dan gizi kurang dan meningkatkan Angka Harapan Hidup Ibu dan Bayi.

Upaya Pemerintah melalui program-program pembangunan yang telah dilakukan diantaranya meningkatkan akses masyarakat terhadap fasilitas kesehatan dan meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu dan berkualitas, merata serta terjangkau, yaitu dengan memberikan pelayanan kesehatan gratis bagi penduduk miskin, menyediakan sumber daya kesehatan yang kompeten dan mendistribusikan tenaga kesehatan secara merata keseluruh wilayah, meningkatkan sarana dan prasarana kesehatan melalui pembangunan puskesmas, rumah sakit, poskesdes dan posyandu serta menyediakan obat-obatan yang terjangkau oleh masyarakat.

### DERAJAT DAN STATUS KESEHATAN PENDUDUK

Menurut Hendrik L. Blumm seorang profesor emeritus administrasi kesehatan dan perencanaan di University of California, terdapat 4 faktor yang mempengaruhi derajat

kesehatan masyarakat yaitu : faktor perilaku, lingkungan, keturunan dan pelayanan kesehatan. Faktor keturunan merupakan faktor yang paling sulit dalam mengatasinya jika penyakit sudah diderita, yang terbaik adalah pencegahan yang dilakukan sebelum penyakit secara keturunan ini muncul. Tiga faktor lain dapat diupayakan oleh pemerintah dan masyarakat dalam meningkatkan kesehatan masyarakat antara lain semakin baik dan semakin mudah akses pelayanan kesehatan bagi semua kelompok masyarakat, perilaku hidup sehat oleh masyarakat luas dan disertai semakin baiknya kondisi sosial-ekonomi masyarakat dalam memberikan dukungan peningkatan kesehatan lingkungan.

Merujuk pada konsep yang diterapkan oleh BPS dalam Susenas, Morbiditas (angka kesakitan) menunjukkan adanya gangguan/keluhan kesehatan yang mengakibatkan terganggunya aktivitas sehari-hari baik dalam melakukan pekerjaan, bersekolah, mengurus rumah tangga maupun melakukan aktivitas lainnya. Pada umumnya keluhan kesehatan yang mengindikasikan adanya suatu penyakit yang biasa dialami oleh penduduk adalah panas, batuk, pilek, asma/napas sesak, diare, sakit kepala berulang, sakit gigi, campak, dll. Semakin banyak penduduk yang mengalami gangguan kesehatan berarti semakin rendah derajat kesehatan di wilayah tersebut dan menunjukkan angka kesakitan yang tinggi di wilayah tersebut (penduduknya banyak yang mengalami sakit).

Hasil Susenas tahun 2017 menunjukkan angka kesakitan penduduk Kabupaten Batang mencapai 16,64 persen, mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yang mencapai 14,71 persen. Angka kesakitan penduduk tahun 2017 baik laki-laki maupun perempuan cenderung mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Angka kesakitan laki-laki lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan karena faktor aktivitas sehari-hari dan perilaku manusia.

**Tabel 2.1 Angka Kesakitan dan Rata-rata Lamanya Sakit, 2016 dan 2017**

Tahun	Angka Kesakitan (%)			Rata-rata Lama Sakit (hari)		
	Laki-laki	Perempuan	Total	Laki-laki	Perempuan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2016	14,04	15,38	14,71	5,28	5,14	5,21
2017	17,12	16,15	16,64	1,12	0,96	1,04

Sumber : Diolah dari Hasil Susenas

Indikator lain disamping angka kesakitan yaitu rata-rata lama sakit penduduk. Lamanya sakit merupakan salah satu indikator yang memberikan gambaran mengenai kondisi keluhan kesehatan yang dirasakan oleh penduduk suatu wilayah. Hasil Susenas 2017 menunjukkan penurunan rata-rata lamanya sakit dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2017 secara total penduduk Kabupaten Batang memiliki rata-rata lama sakit sebesar 1,04 hari, sedangkan tahun sebelumnya 5,21 hari. Penurunan ini cukup signifikan terutama untuk penduduk perempuan yaitu 5,14 persen tahun 2016 menjadi sebesar 0,96 tahun 2017. Kemudian rata-rata lama sakit penduduk laki-laki tahun 2016 sebesar 5,28 persen turun menjadi sebesar 1,12 persen tahun 2017.

Semakin besar rata-rata lama sakit, maka keluhan kesehatan suatu penyakit yang dialami penduduk dapat diasumsikan cukup serius dan dapat mempengaruhi tingkat produktivitas penduduk. Meskipun angka kesakitan laki-laki menunjukkan kecenderungan lebih tinggi dibandingkan angka kesakitan perempuan, namun selama dua tahun terakhir lamanya sakit perempuan ternyata lebih singkat dibanding laki-laki. Hal ini menjadi indikasi bahwa sakit yang dialami oleh penduduk laki-laki terhitung lebih kronis sehingga mengakibatkan lamanya proses penyembuhan lebih panjang dibanding dengan penduduk perempuan.

## TINGKAT IMUNITAS DAN GIZI BALITA

Ibu yang sedang mengandung harus mulai memperhatikan asupan yang dimakannya dan juga harus melakukan imunisasi, karena hal tersebut merupakan gizi dan imunisasi awal seorang anak dimulai. Kemudian sangat dianjurkan untuk memberikan Air

Susu Ibu (ASI) kepada bayi, karena ASI merupakan makanan pertama bayi yang memiliki peranan penting dalam proses tumbuh kembang anak. ASI memiliki manfaat sangat besar untuk jangka panjang, karena ASI adalah nutrisi terbaik dan terlengkap, mengandung protein dan zat-zat gizi berkualitas tinggi serta mengandung zat antibodi yang berguna untuk pertumbuhan dan perkembangan kecerdasan bayi, melindungi tubuh bayi dari alergi dan diare serta penyakit infeksi lainnya. Oleh sebab itu pemerintah menganjurkan agar seorang ibu dapat memberikan ASI eksklusif kepada bayi sejak dilahirkan sampai 6 bulan kedepan, tanpa menambahkan atau mengganti makanan/minuman lain. Selanjutnya setelah bayi berusia 6 bulan ke atas dilanjutkan bersama dengan makanan tambahan dan ASI tetap diberikan hingga usia 2 tahun.

**Tabel 2.2 Persentase Anak Usia Kurang dari 2 tahun yang Pernah Disusui dan Lamanya Disusui, Kabupaten Batang 2016 dan 2017**

Tahun	Anak Usia kurang 2 Tahun yang pernah Disusui	Rata-rata Lama Disusui (bulan)	Asi Eksklusif (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
2016	97,51	9,87	55,96
2017	93,82	0,3	56,63

Sumber : Diolah dari Hasil Susenas

Hasil Susenas 2017 menunjukkan bahwa anak usia kurang dari 2 tahun yang pernah disusui di Kabupaten Batang sebanyak 93,82 persen. Capaian ini lebih rendah dibandingkan tahun 2016 dengan persentase anak berusia kurang dari 2 tahun yang pernah disusui sebesar 97,51 persen. Rata-rata lama disusui juga mengalami penurunan dari 9,87 bulan pada tahun 2016 menjadi 0,3 bulan pada tahun 2017. Banyak faktor yang menyebabkan seorang ibu menghentikan pemberian ASI kepada anaknya, salah satunya adalah ibu tersebut harus melakukan aktifitas pekerjaan untuk membantu menopang ekonomi keluarga dan anak ditinggal di rumah dan digantikan dengan susu formula. Padahal, pemberian ASI dapat dilakukan meskipun ibu bekerja yakni melalui pemerahan ASI. Hal inilah yang belum banyak disosialisasikan dan juga minimnya fasilitas ditempat kerja ibu yang mendukung ibu untuk terus memberikan ASI hingga anak berusia dua tahun.

Edukasi mengenai pentingnya ASI eksklusif bagi bayi hingga umur enam bulan sudah mulai disadari oleh para ibu dan dilaksanakan, terlihat peningkatan pemberian ASI eksklusif pada tahun 2017 dengan jumlah 56,63 persen sedangkan tahun 2016 hanya 55,96 persen.

Dianjurkannya seorang ibu dapat menyusui bayinya selama 2 tahun, karena semakin lama bayi mendapatkan ASI akan memberikan kekebalan/proteksi yang lebih kuat. Bila dilihat perwilayah, rata-rata lama bayi disusui pada tahun 2016 di daerah perdesaan memang lebih lama dibandingkan daerah perkotaan. Namun pada tahun 2017, rata-rata lama bayi disusui diperkotaan lebih tinggi dibanding perdesaan. Hal ini mengindikasikan bahwa edukasi mengenai pemberian ASI diperkotaan telah banyak dilakukan terutama oleh ibu-ibu yang bekerja.

Indikator perbaikan edukasi ASI juga terlihat dari persentase bayi yang mendapatkan ASI Eksklusif. Pemberian ASI dikatakan eksklusif jika hingga usia 6 bulan bayi hanya mengonsumsi ASI saja tanpa tambahan makanan/minuman lainnya. Baik di perkotaan maupun di perdesaan, persentase bayi yang memperoleh ASI Eksklusif mengalami peningkatan. Peningkatan persentase di perdesaan lebih pesat jika dibanding wilayah perkotaan. Hal ini sangat menggembirakan mengingat dalam masyarakat perdesaan, masih banyak ditemui anggapan bahwa bayi boleh diberikan makanan selain ASI tanpa menunggu usia 6 bulan. Hal inilah yang menggugurkan predikat 'ASI eksklusif' pada seorang bayi.

Selain ASI, imunisasi sangat diperlukan bagi perkembangan dan peningkatan kekebalan daya tahan tubuh balita agar sistem pertahanan tubuhnya kuat terhadap berbagai penyakit. Jenis imunisasi ada dua macam yaitu imunisasi pasif yang merupakan kekebalan bawaan pada anak sejak lahir dan imunisasi aktif dimana kekebalan didapat dari pemberian vaksin kepada anak melalui suntik atau tetes. Kementerian Kesehatan menganjurkan agar semua anak-anak dapat memperoleh imunisasi secara lengkap. Anak yang mendapat imunisasi dasar lengkap akan mendapatkan kekebalan dari beberapa penyakit berbahaya, memperkecil resiko untuk sakit dan akan mencegah penularan kepada orang di sekitarnya.

Jenis imunisasi yang wajib diberikan pada balita adalah BCG, DPT, Polio, Campak/Morbili dan Hepatitis B.

**Tabel 2.3. Persentase Anak Balita (0-59Bulan) yang Pernah Diimunisasi Menurut Jenis Imunisasi, 2016 dan 2017**

Jenis Imunisasi	Tahun	
	2016	2017
(1)	(2)	(3)
Pernah Diimunisasi	60,38	63,97
BCG	94,80	95,55
DPT	89,46	95,87
Polio	83,90	95,77
Campak	51,61	96,64
Hepatitis B	76,63	96,78

Sumber: Diolah dari Hasil Susenas

Dalam kurun waktu 2 tahun berdasarkan hasil Susenas 2016 dan 2017, mayoritas anak umur 0-59 bulan yang mendapatkan imunisasi wajib sudah mencapai lebih dari 95 persen. Dari data yang ada hanya imunisasi campak yang persentasenya belum mencapai 97 persen. Faktor yang menghambat pemberian imunisasi campak perlu dilakukan penelitian dan dilakukan terobosan dari pemerintah khususnya Dinas Kesehatan sehingga pencapaiannya dapat seperti imunisasi dasar lainnya.

## PEMANFAATAN FASILITAS TENAGA KESEHATAN

Akses penduduk dalam memanfaatkan tenaga kesehatan dapat dilihat dari ketersediaan/kemudahan mencapai fasilitas/tempat dan tenaga kesehatan sebagai rujukan penduduk jika mengalami keluhan sakit hingga harus pergi berobat. Dari informasi tersebut dapat teridentifikasi berbagai masalah yang dihadapi penduduk dalam mengakses dan memanfaatkan fasilitas serta pelayanan kesehatan. Beberapa faktor yang menjadi pertimbangan penduduk adalah jarak tempat tinggal dengan letak sarana pelayanan

kesehatan, kualitas pelayanan, sosial-ekonomi penduduk yaitu kemampuan penduduk untuk membiayai pengobatannya serta jenis pelayanan kesehatan.

Pada umumnya pemanfaatan fasilitas kesehatan oleh penduduk sangat erat terkait dengan kondisi sosial ekonomi penduduk dan kondisi wilayah tempat tinggal mereka berada. Tampak perbedaan kualitas kesehatan yang nyata antara penduduk di perdesaan dengan penduduk perkotaan ini dapat disebabkan oleh perbedaan ketersediaan dan jarak menuju kefasilitas pelayanan kesehatan tersebut, ditambah lagi perilaku penduduk itu sendiri.

**Tabel 2.4. Persentase Penduduk yang Berobat Jalan Menurut Tempat Berobat Kabupaten Batang, 2016 dan 2017**

Fasilitas Pelayanan	Tahun	
	2016	2017
(1)	(2)	(3)
Rumah Sakit Pemerintah	6,07	6,27
Rumah Sakit Swasta	3,7	5,69
Praktek Dokter/klinik/ Bidan/Balai Pengobatan	61,95	66,58
Puskesmas	29,09	22,31
Pengobatan Tradisional	1,69	1,2
Lainnya	2,71	0,25
% Penduduk yang Berobat jalan	57,62	51,26

Sumber : Diolah dari Hasil Susenas

Penjaminan kesehatan masyarakat melalui BPJS membuka akses dan peluang yang lebih besar kepada masyarakat secara umum untuk mendapatkan haknya mendapatkan pelayanan kesehatan gratis dengan melakukan pembayaran premi yang terjangkau. Tidak hanya di Puskesmas dan rumah sakit, fasilitas BPJS dapat pula dinikmati di klinik kesehatan terdekat dan dokter keluarga. Pola yang didapat masih sama dengan periode sebelumnya yakni praktek dokter/klinik/bidan/balai pengobatan menjadi tujuan mayoritas masyarakat dalam berobat. Hal ini terjadi di daerah perkotaan maupun perdesaan. Dipilihnya fasilitas ini karena lebih banyak tersebar diseluruh wilayah dan prosedurnya lebih mudah dibandingkan dirumah sakit.

Fenomena yang cukup menarik yaitu semakin meningkatnya pengobatan tradisional selama 2016-2017 di perkotaan namun menunjukkan penurunan di wilayah perdesaan. Hal ini tak lepas dari banyaknya pengobatan herbal yang semakin banyak dijumpai dan bahkan menjadi tren pengobatan di wilayah perkotaan. Kesadaran masyarakat untuk kembali ke alam termasuk dalam menyembuhkan penyakitnya turut mendorong minat pengobatan tradisional di Kabupaten Batang. Namun demikian, semakin banyaknya fasilitas kesehatan baik pengobatan modern dan tradisional, yang paling baik adalah upaya masyarakat untuk mencegah penyakit secara preventif.



## BAB 3. PENDIDIKAN

Pendidikan merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia. Oleh sebab itu maka setiap warga negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya. Hak memperoleh pendidikan bagi setiap warga negara tidak memandang status sosial, status ekonomi, suku, etnis, agama, dan gender. Hal tersebut sudah tertuang dalam UUD1945. Berdasarkan UUD 1945 Pasal 28C, ayat 1) dinyatakan bahwa setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan, memperoleh manfaat dari IPTEK, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidup dan demi kesejahteraan umat manusia. Selanjutnya dalam Pasal 31 ayat 2) dinyatakan bahwa setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.

Pendidikan dasar sebagai bagian dari hak asasi manusia dan hak setiap warga negara, maka dalam usaha pemenuhannya harus direncanakan dan dijalankan dengan sebaik mungkin. Pemenuhan atas hak untuk mendapatkan pendidikan dasar yang layak dan bermutu merupakan ukuran keadilan dan pemerataan atas hasil pembangunan. Hal tersebut juga menjadi investasi sumber daya manusia yang diperlukan untuk mendukung keberlangsungan pembangunan bangsa.

Pemerataan akses dan peningkatan mutu pendidikan diharapkan akan mampu menjadikan warga negara Indonesia memiliki kecakapan hidup sehingga mendorong tegaknya pembangunan manusia seutuhnya serta masyarakat madani dan modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila, sebagaimana yang telah diamanatkan dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional, yang UU No 20 tahun 2003 tersebut juga menjelaskan posisi pemerintah dalam dunia pendidikan. Pemerintah berkewajiban “mencerdaskan kehidupan bangsa”. Pemerintah harus mengusahakan segala yang terkait dengan pendidikan. Baik dari sisi penyelenggaraan, sarana, ketersediaan pengajar. UUD 1945 juga telah mengamanatkan bahwa pemerintah Negara Republik Indonesia (sekaligus Pemerintah Daerah) wajib mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem yang mengatur pendidikan nasional yang mampu menjamin tiap-tiap warga negara memperoleh pemerataan kesempatan dan mutu pendidikan.

Sebagai upaya untuk mencapai tujuan pendidikan nasional, maka pemerintah pusat dan daerah harus memfasilitasi hak pendidikan bagi tiap warganya. Melalui sekolah yang terjangkau dari sisi pembiayaan, bermutu dari segi layanan dan berkualitas dari sisi pembelajaran. Selain pembiayaan pendidikan yang harus ditanggung pemerintah, sarana dan prasarana, kurikulum, dan sumber belajar dan daya dukung lainnya perlu diupayakan pemerintah. Mengacu pada pembahasan diatas, hal-hal yang menyangkut dunia pendidikan akan dibahas dalam bab ini. Beberapa indikator yang akan disajikan didalam publikasi ini, diantaranya Angka Melek Huruf (AMH), Rata-rata Lama Sekolah, Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Murni (APM), Angka Putus Sekolah, Rasio Murid Guru menurut tingkat pendidikan. Indikator-indikator tersebut diolah dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional yang dilakukan BPS dan registrasi yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan Nasional.

## RATA RATA LAMA SEKOLAH DAN HARAPAN LAMA SEKOLAH

Rata-rata lama sekolah merupakan indikator yang dapat digunakan untuk melihat kualitas penduduk dalam hal mengenyam pendidikan formal. Rata-rata lama sekolah itu sendiri mempunyai pengertian jumlah tahun belajar yang telah diselesaikan dalam pendidikan formal (tidak termasuk tahun yang mengulang). Indikator rata-rata lama sekolah sangat penting karena digunakan sebagai salah satu komponen untuk menghitung Indeks Pembangunan Manusia (IPM) khususnya di sektor pendidikan. Rata-rata lama sekolah yang

digunakan dalam penghitungan IPM diukur dari penduduk berusia 25 tahun ke atas, karena pada usia tersebut proses belajar pada pendidikan formal telah berakhir.

Untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dalam sektor pendidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akan menempuh berbagai upaya dengan meningkatkan waktu rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas. Salah satu upaya yang dilakukan adalah memperkecil angka putus sekolah dan meningkatkan jumlah angka yang melanjutkan antar jenjang pendidikan. Menurut Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, cara paling efektif untuk menaikkan waktu rata-rata lama sekolah bukan dengan menyekolahkan kembali penduduk Indonesia yang telah berusia lanjut, tetapi mengupayakan agar tidak ada lagi peserta didik yang putus sekolah. Upaya lain yang dilakukan yaitu dengan meningkatkan akses dan mutu pendidikan anak-anak usia dini (PAUD), meningkatkan partisipasi sekolah jenjang pendidikan dasar yang bermutu, meningkatkan akses dan mutu pendidikan menengah, meningkatkan akses dan daya saing pendidikan tinggi, serta meningkatkan mutu pendidik dan tenaga kependidikan. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) menyiapkan tiga skenario untuk mendongkrak rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas dari 8,01 tahun pada tahun 2012 menjadi 12 tahun pada 2045. Skenario pertama adalah untuk mencapai sasaran 12,35 tahun atau hampir sama dengan Amerika Serikat pada tahun 1995. Skenario kedua adalah untuk mencapai 13,17 tahun, sedangkan skenario ketiga adalah untuk mencapai 14,05 tahun. Hal inilah yang melatarbelakangi program pendidikan menengah universal (PMU) supaya minimal anak usia sampai dengan 18 tahun paling tidak pendidikannya sudah 12 tahun yaitu lulusan SMA, SMK, dan MA (<http://kemdikbud.go.id/kemdikbud/berita/1977>).

**Tabel 3.1. Rata-Rata Lama Sekolah (tahun) dan Harapan Lama Sekolah (Tahun), 2016–2017**

Indikator Pendidikan	Tahun	
	2016	2017
(1)	(2)	(3)
Rat-rata Lama Sekolah	6,42	6,61
Harapan Lama Sekolah	11,51	11,87

Sumber: Diolah dari Hasil Susenas

Secara umum di Kabupaten Batang, rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas pada tahun 2017 sebesar 6,61 tahun. Artinya, bahwa rata-rata penduduk di Kabupaten Batang baru mampu menempuh pendidikan sampai dengan kelas 6 SD atau putus sekolah dikelas 1 SMP. Jika dilihat perkembangan selama 2015-2017, rata-rata lama sekolah makin lama makin meningkat. Meningkatnya rata-rata lama sekolah dari tahun ke tahun tak lepas dari upaya pemerintah maupun masyarakat yang menginginkan kualitas pendidikan makin baik.

Pengamatan lebih jauh menurut jenis kelamin, rata-rata lama sekolah penduduk laki-laki lebih tinggi dibandingkan penduduk perempuan, rata-rata terpaut 1 tahun lebih. Pada masa sekarang ini pemerintah tidak membatasi peluang pendidikan antara laki-laki dan perempuan. Pemerintah memberikan kesempatan yang sama antara laki-laki dan perempuan terlihat dari pendidikan kejuruan yang dahulu hanya untuk laki-laki seperti Sekolah Teknik Menengah (STM) sekarang sudah terbuka juga untuk pelajar perempuan. Perbedaan rata-rata lama sekolah antara laki-laki dan perempuan diduga disebabkan oleh faktor budaya yang masih melekat pada masyarakat Kabupaten Batang khususnya di daerah perdesaan bahwa anak laki-laki lebih diberikan kesempatan untuk bersekolah yang lebih tinggi. Indikator pendidikan lainnya adalah Harapan Lama Sekolah (HLS). Indikator ini mengukur peluang pendidikan yang dapat diperoleh untuk anak usia sekolah (7 tahun ke atas). HLS Kabupaten Batang pada tahun 2017 sebesar 11,87 tahun, artinya anak usia 7 tahun ke atas akan mempunyai peluang bersekolah sampai 11,9 tahun atau hampir lulus

SLTA jika kondisinya minimal sama seperti sekarang. Seperti halnya rata-rata lama sekolah, angka HLS ini semakin lama juga semakin meningkat. Jika diamati menurut jenis kelamin, HLS penduduk laki-laki lebih tinggi dibandingkan perempuan, namun perbedaannya tidak signifikan.

## PENDIDIKAN TERTINGGI YANG DITAMATKAN

Selain indikator pendidikan sebelumnya, kualitas sumberdaya manusia dapat dilihat dari keahlian/keterampilan serta ilmu pengetahuan yang dimilikinya yang dapat digambarkan dari tingkat pendidikan yang ditamatkannya. Seseorang yang menamatkan pendidikannya hingga jenjang pendidikan yang tinggi dapat mempunyai pengetahuan yang luas serta keterampilan/keahlian yang tinggi. Dengan semakin meningkatnya keterampilan/keahlian akan semakin mudah mendapatkan kesempatan untuk bekerja. Indikator tingkat pendidikan yang ditamatkan juga dapat digunakan untuk mengetahui keberhasilan program wajib belajar 9 tahun yang dicanangkan pemerintah.

**Tabel 3.2. Persentase Penduduk Usia 15 Tahun Ke atas menurut Jenjang Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, 2016 dan 2017**

Jenjang Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan (1)	Tahun	
	2016 (2)	2017 (3)
Tidak/Belum Pernah Sekolah	4,63	4,11
Belum Tamat SD/MI	18,09	20,73
SD/MI	46,63	35,83
SMP/MTS	16,3	23,6
SMA/SMK/MA	13,5	16,01
Perguruan tinggi	5,47	3,83

Sumber : Diolah dari Hasil Susenas

Baik diperkotaan maupun perdesaan, porsi penduduk yang tidak bersekolah menurun dari tahun 2016 ke 2017 diikuti dengan peningkatan porsi penduduk usia 15 tahun

ke atas yang belum lulus SD. Hal ini menunjukkan bahwa beberapa penduduk usia 15 tahun ke atas yang belum sekolah mengikuti program kejar Paket A setara pendidikan sekolah dasar. Jika melihat peningkatan persentase penduduk yang hanya lulusan SD, hal ini dimungkinkan karena lulusan kejar Paket A tidak/belum melanjutkan ke program kejar Paket B setara pendidikan menengah pertama. Sementara itu, penurunan persentase lulusan SMP baik di perkotaan maupun di perdesaan dapat berarti dua hal. Pertama, lulusan SMP melanjutkan ke jenjang pendidikan SMA sehingga persentase lulusan SMA meningkat, atau kemungkinan kedua lulusan SD tidak melanjutkan ke SMP sehingga lulusan SD meningkat. Jika melihat angka lulusan SMA yang cukup stabil di perkotaan, kemungkinan akibat jumlah lulusan SMA yang melanjutkan ke perguruan tinggi cenderung stagnan. Jika dilihat lebih jauh, menurut tipe daerah, terlihat penduduk lulusan SMA ke atas cenderung lebih tinggi di daerah perkotaan di banding perdesaan. Hal ini dimungkinkan daerah perkotaan memiliki fasilitas dan akses ke sarana dan fasilitas pendidikan yang lebih mudah jika dibandingkan daerah perdesaan.

Jika dilihat berdasarkan jenis kelamin, persentase penduduk yang tidak/belum pernah sekolah untuk penduduk usia 15 tahun ke atas meningkat baik laki-laki maupun perempuan. Baik pada jenis kelamin laki-laki maupun perempuan, peningkatan tersebut diiringi dengan menurunnya persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang belum tamat SD/MI. Hal ini menunjukkan bahwa masih adanya penduduk yang belum mengikuti program kejar Paket A.

Seperti yang diharapkan oleh banyak pihak, persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang lulus SMA dan perguruan tinggi meningkat dari tahun 2016 ke 2017 pada jenis kelamin perempuan, sedangkan pada laki-laki persentasenya mengalami penurunan. Persentase laki-laki lebih tinggi dibanding perempuan pada lulusan SMA, namun cenderung seimbang bahkan laki-laki masih lebih banyak dari perempuan pada lulusan perguruan tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa lulusan SMA laki-laki masih banyak yang melanjutkan sekolah ke perguruan tinggi dan kemungkinan ada juga yang langsung memutuskan untuk mencari pekerjaan.

**Tabel 3.3. Persentase Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas menurut Jenis Kelamin dan Jenjang Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, 2017**

Jenjang Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan (1)	Janui Kelamin		
	Laki-laki (2)	Perempuan (3)	Total (4)
Tidak/Belum Pernah Sekolah	1,94	6,23	4,11
Belum Tamat SD/MI	15,41	25,96	20,73
SD/MI	37,49	34,19	35,83
SMP/MTS	24,00	23,20	23,60
SMA/SMK/MA	19,18	12,90	16,01
Perguruan tinggi	3,92	3,74	3,83

Sumber : Diolah dari Hasil Susenas

## ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH

Angka partisipasi sekolah merupakan salah satu indikator yang dapat mengukur partisipasi masyarakat dalam mengikuti pendidikan dari berbagai jenjang pendidikan dan kelompok umur. Tingkat partisipasi sekolah yang dapat diukur diantaranya yaitu Angka Partisipasi Sekolah (APS) dan Angka Partisipasi Murni (APM). Pemerintah berharap agar kedua indikator selalu menunjukkan peningkatan setiap tahunnya pada setiap jenjang pendidikan. Hal ini dapat menunjukkan bahwa semakin banyak masyarakat memperoleh layanan pendidikan dasar dan menengah yang bermutu dan berkesetaraan.

Berdasarkan data Susenas tahun 2017, terjadi peningkatan Angka Partisipasi Sekolah (APS) secara umum dari tahun 2016 ke 2017. APS untuk kelompok usia 7-12 tahun dapat dikatakan memuaskan karena nilainya mendekati 100 persen baik laki-laki maupun perempuan. Yang perlu menjadi perhatian pada kelompok usia 13-15 tahun dan kelompok usia 16-18 tahun karena fenomena menurunnya APS pada jenis kelamin laki-laki. Meskipun penurunannya hanya sedikit, namun hal ini tetap harus menjadi perhatian pemerintah karena penurunan APS menunjukkan hal yang negatif dalam dunia pendidikan.

Sementara itu, untuk kelompok usia 13-15 tahun terjadi penurunan APS pada jenis kelamin laki-laki yang relatif besar, demikian juga dengan jenis kelamin perempuan APS

mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2016. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran perempuan untuk melanjutkan sekolah mengalami peningkatan. Sementara itu, untuk jenjang usia 16-18 tahun, APS masih dibawah 80 persen. APS perempuan mengalami penurunan dibandingkan tahun 2016.

**Tabel 3.4. Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Usia Sekolah dan Jenis Kelamin, 2016 dan 2017**

Kelompok Umur	2016			2017		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
7-12	100	99,44	99,73	100	100	100
13-15	99,38	98,27	95,63	95,13	92,45	93,96
16-18	58,8	72,65	64,48	56,05	65,47	60,9
19-24	21,91	22,1	22,01	22,18	17,74	20,02

Sumber : Diolah dari Hasil Susenas

APS pada kelompok umur 19-24 tahun mengalami peningkatan dari tahun 2016 ke 2017 pada laki-laki. APS laki-laki mengalami peningkatan yaitu 21,91 persen tahun 2016 menjadi sebesar 22,18 persen tahun 2017, sedangkan APS perempuan cenderung mengalami penurunan yaitu 22,1 persen tahun 2016 menjadi 17,74 persen tahun 2017. APS perempuan pada tahun 2017 tidak lebih tinggi dibandingkan APS laki-laki. Hal ini dimungkinkan bahwa laki-laki yang lulus pendidikan sekolah menengah atas terutama sekolah menengah kejuruan langsung melanjutkan mengikuti pendidikan perguruan tinggi meskipun ada yang mencari pekerjaan.

**Tabel 3.5. Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin, 2016 -2017**

Jenjang Pendidikan	2016			2017		
	L	P	L+P	L	P	L+P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
SD/MI	100,00	97,83	98,93	100,00	100,00	100,00
SMP/MTs	76,55	80,86	78,52	95,37	92,77	93,96
SMA/MA/SMK	52,10	52,69	52,34	68,61	54,46	60,90
Perguruan Tinggi	9,33	12,96	11,16	13,44	25,41	20,02

Sumber : Diolah dari Hasil Susenas

Jika dilihat menurut jenis kelamin, APM pada semua jenjang pendidikan SD, SMP, dan SMA kecenderungannya mengalami peningkatan demikian juga dengan APM secara total juga mengalami peningkatan. Peningkatan APM tertinggi yaitu pada jenjang pendidikan SMP/MTs yaitu dari 78,52 persen tahun 2016 menjadi sebesar 93,96 persen tahun 2017, kemudian diikuti jenjang pendidikan Perguruan Tinggi yaitu dari 11,16 persen tahun 2016 menjadi sebesar 20,02 persen tahun 2017. Fenomena yang menarik untuk dicermati yaitu APM perempuan pada jenjang pendidikan Perguruan Tinggi jauh lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki dalam 2 tahun terakhir. Hal ini semakin memperkuat dugaan bahwa perempuan lebih 'tertib usia' dalam melanjutkan pendidikan perguruan tinggi. Sedangkan laki-laki biasanya lebih condong pada pilihan untuk mencari pekerjaan terlebih dahulu setelah lulus SMA.

## **KUALITAS PELAYANAN PENDIDIKAN**

Salah satu faktor yang menentukan keberhasilan program pembangunan nasional khususnya dalam bidang pendidikan yaitu pelayanan pendidikan yang baik dan berkualitas. Oleh karena itu, peningkatan mutu layanan pendidikan merupakan program utama pemerintah untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang berkualitas dalam rangka mencerdaskan bangsa. Beberapa indikator yang dapat digunakan untuk mengetahui kualitas pelayanan pendidik antara lain rasio murid-guru, rasio guru-sekolah.

Rasio murid-guru adalah jumlah murid dibandingkan dengan jumlah guru pada setiap jenjang pendidikan. Rasio murid per guru dapat memberikan gambaran mengenai besarnya beban kerja guru dalam mengajar. Rasio murid-guru ini digunakan untuk mengetahui rata-rata jumlah murid yang dilayani oleh satu orang guru disuatu sekolah atau daerah tertentu. Semakin tinggi nilai rasionya, diduga akan semakin berkurang pengawasan/perhatian guru terhadap murid sehingga kualitas pengajaran akan cenderung semakin rendah. Dengan kata lain, jika rasio tinggi, ini berarti satu orang tenaga pengajar harus melayani banyak murid. Banyaknya murid yang diajarkan mengurangi daya tangkap murid pada pelajaran yang diberikan atau mengurangi efektivitas pengajaran. Hal ini umumnya diasumsikan bahwa rasio murid-guru yang rendah menandakan kelas yang lebih kecil sehingga memungkinkan para guru untuk lebih memperhatikan setiap siswa. Indikator ini tidak memperhitungkan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kualitas belajar/mengajar, seperti perbedaan dalam kualifikasi guru, pelatihan pedagogik, pengalaman dan status, metode pengajaran, kondisi bahan ajar, dan variasi didalam kelas.

Secara umum, selama 2 tahun terakhir dari tahun 2016/2017 ke 2017/2018 terjadi peningkatan rasio murid-guru pada jenjang pendidikan Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah Menengah (SM) hingga tahun 2016/2017. Rasio murid guru jenjang pendidikan SD 14,48 murid tahun 2016/2017 menjadi 16,31 murid tahun 2017/2018, kemudian jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) yaitu dari 16,20 murid tahun 2016/2017 menjadi 16,73 murid tahun 2017/2018 dan jenjang pendidikan Sekolah Menengah (SM) dari 14,07 murid tahun 2016/2017 menjadi 14,27 murid tahun 2017/2018. Peningkatan rasio murid-guru menunjukkan bahwa peningkatan jumlah siswa tidak diimbangi dengan peningkatan jumlah guru. Dikhawatirkan jika jumlah rasio murid-guru meningkat, menyebabkan beban guru menjadi lebih berat dan proses belajar mengajar menjadi kurang efektif.

**Tabel 3.6. Perkembangan Rasio Murid-Guru, Guru-Sekolah, 2016/2017-2017/2018**

Tahun	Rasio					
	Murid Guru			Guru Sekolah		
	SD	SMP	SMA	SD	SMP	SMA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2016/2017	14,48	16,20	14,07	9,08	20,17	27,38
2017/2018	16,31	16,73	14,27	8,09	19,15	27,43

Sumber: Indikator Kesra 2017/2018 BPS Prov. Jawa Tengah

Rasio guru-sekolah didefinisikan sebagai perbandingan antara jumlah tenaga pengajar dibandingkan dengan jumlah sekolah pada suatu jenjang pendidikan tertentu untuk mengetahui kekurangan/kelebihan tenaga pengajar yang mengajar disekolah pada suatu daerah tertentu. Makin rendah nilai rasio, berarti makin terbatas juga jumlah tenaga pengajar yang mengajar disuatu jenjang pendidikan tertentu, sebaliknya makin besar nilai rasio mengindikasikan kemungkinan terjadinya kelebihan tenaga pengajar pada sekolah tersebut, untuk kebijakan berupa mutasi guru perlu dilakukan.

Secara umum, selama 2 tahun terakhir dari tahun 2016/2017 ke 2017/2018 terdapat tendensi penurunan rasio guru-sekolah pada jenjang pendidikan Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP). Rasio guru-sekolah jenjang pendidikan SD 9,08 guru tahun 2016/2017 menjadi 8,09 guru tahun 2017/2018, kemudian jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) yaitu dari 20,17 guru tahun 2016/2017 menjadi 19,15 guru tahun 2017/2018. Penurunan rasio guru-sekolah kemungkinan disebabkan oleh meningkatnya jumlah sekolah baru dan dikhawatirkan dapat menyebabkan proses belajar mengajar menjadi kurang efektif karena jumlah tenaga pengajar kurang berimbang. Sedangkan rasio guru-sekolah pada jenjang pendidikan Sekolah Menengah (SM) cenderung meningkat yaitu dari 27,38 murid tahun 2016/2017 menjadi 27,43 murid tahun 2017/2018.





## BAB 4. KETENAGAKERJAAN

Permasalahan dibidang ketenagakerjaan harus terus menjadi perhatian pemerintah agar dapat cepat diselesaikan. Permasalahan tersebut diantaranya tingginya tingkat pengangguran, masih rendahnya perluasan kesempatan kerja, banyaknya pekerja anak, rendahnya produktivitas kerja, persebaran tenaga kerja yang tidak merata dan sebagainya. Kondisi tersebut merupakan tantangan yang harus diselesaikan dalam pembangunan Kabupaten Batang. Pembangunan dibidang ketenagakerjaan merupakan bagian dari upaya pengembangan sumber daya manusia yang memegang peranan penting untuk mewujudkan pembangunan manusia seutuhnya. Oleh sebab itu, pembangunan di bidang ketenagakerjaan diupayakan memberikan kontribusi yang nyata dan terukur dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam rangka penyusunan kebijakan, strategi dan program ketenagakerjaan untuk pemecahan masalah ketenagakerjaan, sangat dibutuhkan data dan informasi ketenagakerjaan. Strategi dan program ketenagakerjaan yang tepat sangat ditentukan kondisi ketersediaan data dan informasi ketenagakerjaan.

Konsep ketenagakerjaan yang digunakan oleh BPS adalah *The Labor Force Concept* merujuk pada rekomendasi *International Labour Organization (ILO)*. Konsep ini membagi penduduk menjadi dua kelompok yaitu penduduk usia kerja dan bukan usia kerja. Selanjutnya, penduduk usia kerja dibedakan pula menjadi dua kelompok berdasarkan kegiatan utama yang dilakukan yakni angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja terdiri dari dua bagian yaitu bekerja dan pengangguran. Sementara bukan angkatan kerja mencakup sekolah, mengurus rumahtangga dan lainnya.

Secara alamiah pertumbuhan angkatan kerja searah dengan pertumbuhan penduduk. Namun demikian pertumbuhan penciptaan lapangan kerja yang baru berjalan

lebih lambat dibandingkan pertumbuhan penduduk usia kerja. Hal ini mengakibatkan tidak semua angkatan kerja terserap oleh pasar kerja, sehingga terjadi ketidakseimbangan antara penawaran kerja dan permintaan tenaga kerja. Ketidakseimbangan ini akan menciptakan persoalan ketenagakerjaan yaitu pengangguran.

Bab ini menyajikan gambaran umum mengenai keadaan angkatan kerja di Kabupaten Batang. Beberapa indikator yang dianalisa mencakup Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), penduduk bekerja dan pekerja anak. Sumber data penghitungan indikator ini diperoleh dari Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS).

## TINGKAT PARTISIPASI ANGKATAN KERJA (TPAK) DAN TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA (TPT)

Keterlibatan penduduk yang aktif dalam kegiatan ekonomi diukur dari banyaknya penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang masuk dalam pasar kerja, baik mereka yang statusnya bekerja atau yang mencari pekerjaan (menganggur). Indikator yang digunakan untuk mengukur besaran tersebut adalah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). TPAK memberikan gambaran tentang penduduk yang aktif secara ekonomi. Indikator ini diperoleh dari perbandingan angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja.

Selain TPAK, dalam analisis angkatan kerja juga dikenal indikator yang digunakan untuk mengukur pengangguran yaitu Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Pengangguran terbuka didefinisikan sebagai orang yang sedang mencari pekerjaan atau yang sedang mempersiapkan usaha atau juga yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin lagi mendapatkan pekerjaan, termasuk juga mereka yang baru mendapatkan pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Pengangguran terbuka tidak termasuk orang yang masih sekolah atau mengurus rumahtangga, sehingga hanya orang yang termasuk angkatan kerja saja yang merupakan pengangguran terbuka. TPT dihitung dari perbandingan antara banyaknya jumlah pengangguran dengan jumlah angkatan kerja.

**Tabel 4.1 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerjadan Tingkat Pengangguran Terbuka, 2015 dan 2017**

Tahun	TPAK			TPT		
	Laki-laki	Perempuan	Total	Laki-laki	Perempuan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2015	86,01	49,55	67,62	5,55	2,87	4,56
2017	84,25	51,43	67,70	6,81	4,23	5,82

Sumber : Diolah dari Hasil Sakernas

TPAK tahun 2015 yaitu mencapai sebesar 67,62 kemudian meningkat menjadi 67,70 pada tahun 2017. Apabila dilihat menurut jenis kelamin TPak tahun 2015-2017 TPak laki-laki jauh lebih tinggi dibandingkan dengan TPak perempuan, masing-masing yaitu TPak laki-laki tahun 2015 86,01, TPak perempuan 49,55 dan TPak laki-laki tahun 2017 84,25 sedangkan TPak perempuan 51,43. Analisis TPak tanpa variabel lainnya tidak akan menarik karena TPak tidak dapat menggambarkan baik buruknya kondisi ketenagakerjaan disuatu wilayah. TPak yang besar belum menggambarkan kondisi ketenagakerjaan yang baik. Jika besarnya TPak berasal dari jumlah penduduk bekerja, maka dapat menggambarkan kondisi ketenagakerjaan yang baik karena penyerapan tenaga kerja tinggi, tetapi jika berasal dari yang menganggur justru akan menimbulkan persoalan tersendiri.

Ditinjau menurut klasifikasi daerah, TPak di daerah perdesaan cenderung lebih tinggi dari perkotaan, artinya penduduk di perdesaan lebih siap terlibat dalam kegiatan ekonomi produktif. Karena di daerah perdesaan lapangan pekerjaan cenderung tidak membutuhkan persyaratan khusus dibandingkan perkotaan. Disisi lain fasilitas pendidikan tinggi jarang ditemukan dilokasi perdesaaan sehingga hanya sebagian kecil penduduk perdesaan yang mampu melanjutkan pendidikan tinggi, itupun harus melanjutkan pendidikan di perkotaan dengan biaya yang tidak sedikit.

TPT menggambarkan ketidakseimbangan antara ketersediaan lapangan pekerjaan dan penduduk yang berusaha mendapatkan pekerjaan, dimana ketersediaan lapangan

pekerjaan lebih kecil dari pencari kerja sehingga tidak mampu menampung pencari kerja. Perkembangan TPT di Kabupaten Batang selama periode 2015-2017 mengalami peningkatan dari 4,56 persen naik menjadi 5,82 persen. Pengangguran meningkat, sehingga masih harus diteliti lebih lanjut, lapangan pekerjaan apa yang dapat menyerap lapangan kerja dan mereka yang sudah bekerja apakah sudah memiliki produktivitas yang tinggi yang salah satunya dapat dilihat dari jam kerja yang digunakan. Pembahasan jumlah jam kerja akan dibahas pada subbab selanjutnya.

Gambaran TPT menurut daerah perkotaan dan perdesaan, terlihat pengangguran di perkotaan lebih tinggi dibandingkan di perdesaan. Hal ini dapat dipahami, dimana di daerah perkotaan tingkat pendidikan lebih tinggi dibandingkan perdesaan. Mereka yang berpendidikan menengah ke atas memiliki kecenderungan lebih memilih-milih pekerjaan dibandingkan yang pendidikan rendah, sehingga mereka setelah selesai sekolah tidak segera memperoleh pekerjaan. Berbeda dengan daerah perdesaan mereka lebih dapat menerima pekerjaan apa saja demi untuk menyambung hidupnya tanpa melihat apakah pekerjaan tersebut dapat mencukupi kebutuhan atau tidak karena sebagian besar sudah tidak ada pilihan lain.

Jika ditilik perkembangan selama 2 tahun TPT daerah perdesaan maupun perkotaan pada tahun 2015 sama-sama turun namun dilihat rata-rata penurunannya, TPT perdesaan turunnya sedikit lebih cepat dibandingkan daerah perkotaan. Data ini memberikan gambaran yang positif dimana kantong kemiskinan di Kabupaten Batang sebagian besar di daerah perdesaan. Cepatnya penurunan pengangguran di daerah perdesaan merupakan peluang untuk pengentasan kemiskinan namun tinggal bagaimana pekerjaan tersebut agar memiliki produktivitas yang tinggi. Sehingga mampu memberikan penghidupan dan dengan sendirinya akan mengurangi kemiskinan. Sedangkan pada tahun 2017, TPT daerah perdesaan meningkat dan TPT perkotaan menurun. Hal tersebut dapat disebabkan oleh bertambahnya lapangan kerja di perkotaan mampu menyerap tenaga kerja sehingga TPT perkotaan menurun.

Pendidikan yang tinggi merupakan jembatan untuk memperoleh pekerjaan yang layak dengan pendapatan besar. Hampir semua orang berkeinginan bekerja dengan penghasilan yang tinggi, untuk itu mereka berupaya dengan memperoleh pendidikan tinggi. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang akan berdampak pada semakin tinggi pula harapan dan kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan tingkat pendidikannya. Namun, keterbatasan lapangan kerja yang tersedia menyebabkan mereka tidak terserap pada lapangan usaha yang sesuai dengan tingkat pendidikan dan keahliannya. Sebagian besar dari mereka yang merupakan lulusan pendidikan tinggi enggan menerima pekerjaan yang tidak sesuai dengan jenis keahlian dan jenjang pendidikan yang telah diatamatkan. Sehingga sebagian dari mereka yang tidak segera mendapatkan pekerjaan lebih memilih menunggu pekerjaan yang sesuai, atau dengan kata lain menjadi penganggur untuk sementara waktu.

Perkembangan TPT menurut jenjang pendidikan selama periode 2015 dan 2017 memiliki kecenderungan disparitasnya menyempit. Jika pada tahun 2015 TPT menurut pendidikan terdistribusi antara 3,89 persen sampai 36,41 persen antar jenjang pendidikan namun pada tahun 2017 terdistribusi antara 1,69 sampai 34,69.

**Tabel 4.2. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Tingkat Pendidikan, 2015 dan 2017**

Pendidikan Ditamatkan	2015			2017		
	Jenis Kelamin		Total	Jenis Kelamin		Total
	laki-laki	perempuan		laki-laki	perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Tidak/Belum Pernah Sekolah	2,91	0,00	2,23	3,28	0,00	2,37
Tidak/Belum Tamat SD	8,32	8,44	8,35	4,46	5,82	4,84
Sekolah Dasar	19,06	8,34	16,56	11,62	10,72	11,37
SMP	36,63	35,66	36,41	18,49	18,29	18,44
SMA Umum	14,22	14,09	14,19	21,60	39,61	26,61
SMA Kejuruan	13,79	33,47	18,37	38,21	25,56	34,69
Universitas	5,07	0,00	3,89	2,34	0,00	1,69

Sumber : Diolah dari Hasil Sakernas

Melihat struktur TPT menurut tingkat pendidikan, ada kecenderungan TPT lebih tinggi untuk tingkat pendidikan menengah tinggi. Pada tingkat pendidikan rendah dan yang belum pernah bersekolah hampir semua angkatan kerja dapat tertampung dilapangan pekerjaan dengan segala kondisi dan jenis pekerjaan. TPT pada jenjang pendidikan SMK merupakan TPT tertinggi dibandingkan jenjang pendidikan lainnya di atas 10 persen. Sementara TPT pada tingkat pendidikan perguruan tinggi masih lebih rendah dibandingkan tingkat SMA. Hal ini disebabkan tamatan perguruan tinggi tidak sebanyak dibandingkan SMA sehingga sebagian besar lulusan perguruan tinggi masih cukup tertampung pada lapangan pekerjaan yang ada.

Jika diamati berdasarkan daerah tempat tinggal, daerah perdesaan memiliki disparitas yang cukup tinggi di bandingkan perkotaan. Pada daerah perdesaan, orang yang memiliki pendidikan rendah jarang dijumpai sedang menganggur. Sebaliknya, mereka yang berpendidikan tinggi lebih sulit untuk memperoleh pekerjaan di perdesaan dibandingkan daerah perkotaan.

## LAPANGAN PEKERJAAN DAN STATUS PEKERJAAN

Distribusi penduduk yang bekerja menurut lapangan usaha merupakan salah satu ukuran untuk melihat potensi ekonomi dalam melihat penyerapan tenaga kerja. Ukuran ini memberikan gambaran sektor mana yang dominan menyerap tenaga kerja dan sebaliknya. Distribusi penduduk yang bekerja menurut lapangan usaha pada publikasi ini dikelompokkan menjadi 3 sektor lapangan usaha yaitu pertanian (pertanian, kehutanan, perburuan dan perikanan), industri (pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, listrik, gas dan air serta bangunan), dan jasa-jasa (perdagangan besar, eceran, asuransi, usaha persewaan bangunan, tanah dan jasa perusahaan serta jasa kemasyarakatan).

Perkembangan lapangan usaha selama 2015 dan 2017, persentase penduduk yang bekerja pada sektor jasa-jasa semakin menurun. Sektor pertanian dari tahun 2015 ke 2017 terus mengalami penurunan. Hal ini berpengaruh pada sektor industri dimana pada tahun

2015 penyerapan tenaga kerja menurun dari 36,21 persen menjadi 32,60 persen pada tahun 2017.

Jika diperhatikan menurut jenis kelamin, gambaran pergeseran penyerapan tenaga kerja ke sektor industri dari sektor lainnya lebih terasa terutama bagi pekerja perempuan disektor industri yaitu 33,99 persen tahun 2015 turun menjadi 28,33 persen tahun 2017, sedangkan pekerja industri laki-laki tahun 2015 terserap 36,21 persen turun menjadi 35,33 persen tahun 2017. Penurunan penyerapan tenaga kerja industri diduga sebagai dampak dari penyerapan tenaga kerja pada sektor jasa-jasa seperti perdagangan besar dan eceran, rumah makan dan hotel, angkutan dan pergudangan, komunikasi, keuangan, asuransi, sewa persewaan bangunan, tanah dan jasa kemasyarakatan .

**Tabel 4.3. Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Kelompok Lapangan Usaha, 2015 dan 2017**

Kelompok Usaha	2015			2017			
	laki-laki	perempuan	Total	laki-laki	perempuan	Total	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Pertanian (A)	34,03	22,05	29,53	31,02	19,41	26,49	
Industri (M)	36,21	33,99	35,37	35,33	28,33	32,60	
Jasa-jasa (S)	29,76	43,96	35,10	33,65	52,26	40,90	

Sumber : Diolah dari Hasil Sakernas, Agustus

Catatan:

Pertanian(A) adalah Pertanian, Kehutanan, Perburuan dan Perikanan.

Industri (M) adalah Pertambangan; Industri Pengolahan; Listrik, Gas, dan Air; serta Bangunan.

Jasa-Jasa(S) adalah Perdagangan Besar, Eceran,Rumah Makan dan Hotel; Angkutan, Pergudangan, komunikasi; Keuangan, Asuransi, Usaha Persewaan Bangunan, Tanah dan Jasa Perusahaan; Jasa Kemasyarakatan.

Indikator untuk melihat gambaran tentang status/kedudukan pekerja dalam aktivitas pekerjaan yang dijalani adalah distribusi tenaga kerja menurut status pekerjaan utama. Berdasarkan status pekerjaan utama selama beberapa tahun terakhir, mayoritas penduduk Kabupaten Batang bekerja sebagai buruh/karyawan, disusul berusaha dibantu pekerja tak dibayar selanjutnya berusaha sendiri pada urutan ketiga. Melihat perkembangan status

pekerjaan selama tahun 2015 dan 2017, persentase buruh/karyawan terus meningkat dari 34,40 persen pada tahun 2015 kemudian meningkat menjadi 36,30 persen. Kemudian berusaha dibantu pekerja tetap/dibayar meningkat pada tahun 2015 dari 3,18 persen menjadi 4,4 persen pada tahun 2017. Status pekerjaan mandiri lainnya yaitu berusaha sendiri juga cenderung meningkat yaitu dari tahun 2015 sebesar 23,07 persen meningkat menjadi sebesar 23,9 persen.

Meningkatnya buruh/karyawan dan menurunnya berusaha dibantu buruh tidak tetap/tak dibayar sebagai gambaran permasalahan ketenagakerjaan pekerjaan yang kurang menggembirakan. Dimana berbagai program pemerintah dilakukan untuk mendorong lahirnya wirausaha baru yang bisa eksis dalam berbagai kondisi sehingga dapat menciptakan lapangan pekerjaan kurang membuahkan hasil yang memuaskan. Berbagai pelatihan keterampilan diselenggarakan baik melalui dinas terkait maupun bermitra dengan dunia usaha belum mampu mencetak wirausaha. Di sisi lain, persentase pekerja keluarga/tidak dibayar semakin menurun, hal ini merupakan perkembangan positif, karena status pekerjaan ini menggantungkan pada keluarga atau orang lain.

**Tabel 4.4. Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Status Pekerjaan, 2015 dan 2017**

Status Pekerjaan Utama	2015			2017		
	laki-laki	perempuan	Total	laki-laki	perempuan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Berusaha sendiri	16,42	34,11	23,07	19,0	31,6	23,9
Berusaha dibantu buruh tidak tetap/tak dibayar	13,36	10,50	12,28	10,9	11,0	10,9
Berusaha dibantu buruh tetap/dibayar	4,37	1,20	3,18	5,4	2,8	4,4
Buruh/karyawan/pegawai	35,43	32,68	34,40	38,8	32,4	36,3
Pekerja Bebas	25,43	9,26	19,34	23,5	7,8	17,4
Pekerja keluarga/tak dibayar	4,99	12,26	7,73	2,4	14,5	7,1

Sumber : Diolah dari Hasil Sakernas, Agustus

Jika dilihat dari status daerah, struktur pekerja menurut status pekerjaan menurut jenis kelamin, status buruh/karyawan sangat dominan diminati oleh pekerja di Kabupaten Batang, persentasenya lebih dari sepertiga dari jumlah pekerja secara keseluruhan. Selama tahun 2015 dan 2017 persentasenya meningkat yaitu buruh/karyawan/pegawai laki-laki dari 35,43 persen tahun 2015 meningkat menjadi sebesar 38,8 persen tahun 2017.

Status pekerjaan laki-laki yang berusaha dibantu buruh tetap/dibayar tahun 2015 mencapai sebesar 4,37 persen meningkat menjadi sebesar 5,4 persen tahun 2017. Kemudian pekerja laki-laki yang berusaha sendiri tahun 2015 sebesar 16,42 persen setahun kemudian meningkat menjadi sebesar 19,0 persen.

Ketergantungan penduduk yang bekerja pada usaha keluarga lebih besar di terutama bagi perempuan relatif besar, hal ini dapat dilihat dari status pekerjaan sebagai pekerja keluarga tahun 2015 yaitu 12,26 persen meningkat menjadi 14,5 persen tahun 2017. Gambaran di atas bahwa status pekerjaan utama antara laki-laki dan perempuan terdapat ketimpangan, terlihat pada status pekerjaan utama berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tetap/dibayar dan pekerja keluarga/tidak dibayar.

## JUMLAH JAM KERJA

Dalam mengukur tingkat produktivitas tenaga kerja dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya dengan pendekatan jumlah jam kerja. Penggunaan pendekatan ini dengan asumsi semakin besar jumlah jam kerja yang digunakan untuk bekerja maka semakin produktif. Terkait jumlah jam kerja normal seminggu yang digunakan untuk bekerja adalah 35 jam seminggu. Seseorang yang bekerja selama seminggu kurang dari 35 jam dapat dikategorikan sebagai setengah penganggur. Biasanya pekerja semacam ini memiliki pendapatan yang lebih rendah dibandingkan kemampuannya. Dengan asumsi di atas, maka setengah penganggur memiliki tingkat produktivitas yang lebih rendah dibandingkan dengan pekerja dengan jam kerja normal.

Melihat perkembangan penduduk bekerja menurut jam kerja selama 2015 dan 2017, persentase setengah penganggur cenderung meningkat dari 18,62 persen, menjadi

24,90 persen. Meningkatnya setengah penganggur dengan sendirinya mengakibatkan persentase pekerja yang bekerja sesuai jam kerja normal semakin berkurang. Artinya, secara umum dengan menurunnya persentase penduduk yang bekerja dengan jam kerja normal maka tingkat produktivitas semakin menurun. Namun kesimpulan ini hanya dari sisi penggunaan waktu bekerja, masih harus dilihat juga besarnya upah/gaji/pendapatan yang diterima.

Melihat perbandingan antara laki-laki dan perempuan, dari sisi produktivitas pekerjaan dan waktu bekerja terjadi ketimpangan yang cukup signifikan pada periode waktu tahun 2015 dan tahun 2017. Pekerja perempuan yang bekerja dibawah jam kerja normal tahun 2015 yaitu sebesar 30,57 persen sedangkan laki-laki pada tahun yang sama hanya 20,52 persen. Sedangkan pekerja perempuan yang bekerja dibawah jam kerja normal tahun 2017 yaitu mencapai sebesar 34,73 persen sementara laki-laki sebesar 18,62 persen.

**Tabel 4.5. Persentase Penduduk Usia 15 Tahun Ke atas yang Bekerja Menurut Jumlah Jam Kerja Seluruhnya Selama Seminggu, 2015 dan 2017**

Jmlah Jam Kerja	2015			2017		
	laki-laki	perempuan	Total	laki-laki	perempuan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
0	0,49	0,83	0,61	1,08	1,66	1,31
1-14	1,52	5,20	2,90	1,84	5,83	3,39
1-34	18,51	24,54	20,78	15,70	27,24	20,20
35+	79,49	69,44	75,71	81,38	65,27	75,10

Sumber : Diolah dari Hasil Sakernas, Agustus

Catatan: \*)Jumlah jam kerja penduduk yang mempunyai pekerjaan/usaha tetapi selama seminggu yang lalu tidak bekerja karena sesuatu sebab seperti sakit, cuti, menunggu panen atau mogok kerja

## PEKERJA ANAK

Pekerja anak adalah sebuah istilah untuk mempekerjakan seorang anak. Istilah pekerja anak dapat memiliki konotasi pengeksploitasian anak kecil atas tenaga mereka,

dengan gaji yang kecil atau pertimbangan bagi perkembangan kepribadian mereka, keamanannya, kesehatan, dan prospek masa depan.

Keterlibatan anak dalam dunia kerja tidaklah terjadi dengan sendirinya, melainkan disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu berasal dari dalam diri anak maupun karena pengaruh lingkungan terdekat. Selain itu juga disebabkan karena faktor ekonomi, sosial, budaya, dan faktor-faktor lain. Dari faktor ekonomi, kemiskinan merupakan salah satu penyebab utama timbulnya pekerja anak. Penghasilan orang tua yang rendah menyebabkan ketidakmampuannya dalam memenuhi kebutuhan pokok. Kondisi ini mendorong anak terpaksa mengikuti jejak orang tuanya untuk bekerja meskipun tanpa mempunyai bekal keterampilan.

Faktor budaya yang menyebabkan anak bekerja adalah adanya pandangan dari sebagian masyarakat yang lebih menghargai anak yang bekerja. Mereka menganggap bahwa anak yang bekerja adalah anak yang berbakti dan dapat mengangkat harkat dan martabat orang tua. Tingkat pendidikan yang rendah orang tua cenderung berpikiran sempit terhadap masa depan anaknya sehingga tidak memperhitungkan manfaat sekolah yang lebih tinggi dapat meningkatkan kesejahteraan anak dimasa datang. Faktor-faktor lain yang turut menjadi penyebab anak memasuki dunia kerja adalah tersedianya lahan pekerjaan yang dapat dikerjakan dan dimasuki oleh anak. Masih adanya pelaku usaha yang menerapkan pola perekrutan untuk memperoleh tenaga yang murah dan mudah diatur turut mendorong adanya pekerja anak. Menurut WHO, usia seseorang yang dikategorikan anak adalah dibawah 18 tahun (0-17 tahun). Namun data yang tersedia dari Sakernas adalah anak usia 10 tahun ke atas, sehingga dalam penyajian informasi pekerja anak adalah anak dengan rentang usia 10-17 tahun. Selama kurun waktu 2 tahun (2015 dan 2017) persentase pekerja anak mengalami fluktuasi namun cenderung mengalami penurunan. Pada tahun 2017 masih ada pekerja anak sebanyak 1,09 persen, persentase ini lebih rendah dibandingkan tahun 2015 sebesar 1,64 persen.

**Tabel 4.6. Persentase Pekerja Anak Usia 10-17 Tahun, 2015 dan 2017**

Tahun	Jenis Kelamin		Total
	Laki-laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)
2015	2,02	0,99	1,64
2017	1,06	1,16	1,09

Sumber : Diolah dari Hasil Sakernas, Agustus

Berdasarkan jenis kelamin selama kurun waktu 2015 dan 2017 ditemukan pekerja anak dengan persentase yang fluktuatif, ini ditunjukkan dari persentase pekerja anak tahun 2015 yaitu dimana pekerja anak didominasi oleh laki-laki yaitu sebesar 2,02 persen dan perempuan hanya 0,99 persen. Sementara Pada tahun 2017 pekerja anak didominasi oleh perempuan yaitu sebesar 1,16 persen dan laki-laki sebesar 1,06 persen.

**Tabel 4.7. Persentase Pekerja Anak Menurut Kelompok Lapangan Usaha, 2015 dan 2017**

Lapangan Usaha	2015			2017		
	Laki-laki	Perempuan	Total	Laki-laki	Perempuan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Pertanian (A)	80,13	0,00	61,80	38,41	0,00	22,61
Industri (M)	7,91	38,49	14,90	40,66	12,69	29,15
Jasa-jasa (S)	11,97	61,51	23,30	20,93	87,31	48,24

Sumber : Diolah dari Hasil Sakernas, Agustus

Catatan:

Pertanian (A) adalah Pertanian, Kehutanan, Perburuandan Perikanan.

Industri (M) adalah Pertambangan; Industri Pengolahan; Listrik, Gas, dan Air; serta Bangunan

Jasa-Jasa (S) adalah Perdagangan Besar, Eceran, Rumah Makan dan Hotel; Angkutan, Pergudangan, Komunikasi; Keuangan, Asuransi, Usaha Persewaan Bangunan, Tanah dan Jasa Perusahaan; Jasa Kemasyarakatan.

Jika dilihat berdasarkan lapangan usaha, pada tahun 2017 sebagian besar pekerja anak tertampung pada lapangan usaha kelompok jasa-jasa yaitu sebesar 48,24 persen, disusul industri 29,15 persen. Perkembangan selama 2015 dan 2017 terdapat penurunan

pada sektor pertanian yang diikuti peningkatan pada kelompok jasa-jasa. Dominasi sektor pertanian pada tahun 2015 bergeser pada kelompok jasa-jasa tahun.

Namun apabila diamati menurut jenis kelamin perubahan terbesar yaitu pada pekerja anak laki-laki di sektor pertanian tahun 2015 mencapai sebesar 80,13 persen turun menjadi 38,41 tahun 2017. Disisi lain pekerja perempuan disektor industri tahun 2015 yaitu sebesar 38,49 persen juga mengalami penurunan menjadi sebesar 12,69 persen. Gambaran pekerja anak menurut kelompok lapangan usaha tidak berbeda dengan gambaran tenaga kerja secara umum atau dengan kata lain dimana orang tua bekerja disitulah anak belajar bekerja.



## BAB 5. TARAF & POLA KONSUMSI

Pola konsumsi rumah tangga merupakan salah satu indikator kesejahteraan rumah tangga/keluarga. Selama ini berkembang pengertian bahwa besar kecilnya proporsi pengeluaran untuk konsumsi makanan terhadap seluruh pengeluaran rumahtangga dapat memberikan gambaran kesejahteraan rumah tangga tersebut. Rumah tangga dengan proporsi pengeluaran yang lebih besar untuk konsumsi makanan mengindikasikan rumahtangga tersebut berpenghasilan rendah. Makin tinggi penghasilan rumahtangga, maka makin kecil proporsi pengeluaran untuk makanan terhadap seluruh pengeluaran rumah tangga. Dengan kata lain rumah tangga dikatakan sejahtera bila persentase pengeluaran untuk makanan jauh lebih kecil dibandingkan persentase pengeluaran untuk non-makanan.

### PENGELUARAN RUMAH TANGGA

Pengeluaran rumahtangga dibedakan menurut kelompok makanan dan bukan makanan. Perubahan pendapatan seseorang akan berpengaruh pada pergeseran pola pengeluaran. Semakin tinggi pendapatan, cenderung akan semakin tinggi pengeluaran untuk bukan makanan. Pergeseran pola pengeluaran terjadi karena elastisitas permintaan terhadap makanan pada umumnya rendah, sebaliknya elastisitas permintaan terhadap barang bukan makanan pada umumnya tinggi. Keadaan ini jelas terlihat pada kelompok penduduk yang tingkat konsumsi makanannya sudah mencapai titik jenuh, sehingga peningkatan pendapatan akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan bukan makanan atau ditabung. Dengan demikian, pola pengeluaran dapat digunakan sebagai salah satu alat untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk, dimana perubahan komposisinya digunakan sebagai petunjuk perubahan tingkat kesejahteraan.

**Tabel 5.1 Rata-rata Pengeluaran Per Kapita Menurut Jenis Pengeluaran, 2016 dan 2017**

Jenis Pengeluaran	Pengeluaran Rata-rata Perkapita Per Bulan			
	Nominal (Rp)		Persentase	
	2016	2017	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Makanan	339.466	421.949	53,83	55,53
Bukan Makanan	291.156	337.973	46,17	44,47
Perumahan	149.493	156.409	23,71	20,58
Barang & Jasa	73.052	72.148	11,58	9,49
Pakaian	20.380	24.681	3,23	3,25
Barang Tahan Lama	24.154	53.179	3,83	7,00
Lainnya	24.077	31.557	3,82	4,15
Jumlah	630.622	759.922	100,00	100,00

Sumber: Publikasi Pengeluaran untuk Konsumsi Penduduk Jawa Tengah 2017

Tabel 5.1 menyajikan data pengeluaran rata-rata perkapita sebulan untuk makanan dan bukan makanan 2016 dan 2017. Dari tabel tersebut terlihat bahwa selama periode 2016-2017 rata-rata pengeluaran perkapita sebulan penduduk meningkat dari Rp 630.622,00 menjadi Rp 759.922,00. Bila dilihat persentasenya, pengeluaran untuk makanan mengalami peningkatan dari 55,83 persen pada tahun 2016 menjadi 55,53 persen pada tahun 2017. Sebaliknya, pengeluaran bukan makanan menurun dari 46,17 persen menjadi 44,47 persen. Peningkatan pengeluaran pada makanan tidak semata-mata diartikan bahwa kesejahteraan masyarakat menurun, namun bisa pula disebabkan oleh meningkatnya harga komoditas pangan pada tahun 2017. Sementara itu, meskipun pengeluaran non-makanan mengalami penurunan, pengeluaran untuk barang tahan lama mengalami peningkatan.

Jika dilihat rata-rata pengeluaran makanan perkapita menurut kelompok pengeluaran per kapita sebulan, didominasi oleh pengeluaran untuk makanan jadi yaitu sebesar Rp 81.646 (kelompok 40 % terbawah), kemudian disusul pengeluaran untuk padi-padian yaitu sebesar Rp 50.210,00 (kelompok 40 % terbawah), pengeluaran untuk membeli

rokok dan tembakau Rp 34.728,00 (kelompok 40 % terbawah), dan pengeluaran terkecil yaitu untuk membeli umbi umbian yaitu mencapai sebesar Rp 1.611,00 (kelompok 40 % terbawah).

**Tabel 5.2. Rata – rata Pengeluaran untuk Makanan Per Kapita Sebulan Menurut Kelompok Pengeluaran dan Jenis Komoditas (Rupiah), 2017**

Jenis Komoditas	Kelompok Pengeluaran Perkapita Sebulan			
	40% Terbawah	40% Tengah	20% Teratas	Rata-rata
	Pengeluaran Perkapita Sebulan	Pengeluaran Perkapita Sebulan	Pengeluaran Perkapita Sebulan	Pengeluaran Perkapita Sebulan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Padi-Padian	50.210	56.897	64.324	55.711
Umbi-Umbian	1.611	2.661	3.797	2.469
Ikan	16.862	27.282	49.189	27.494
Daging	10.608	14.514	26.409	15.328
Telur dan Susu	14.199	21.876	38.297	22.088
Sayur-Sayuran	26.162	31.223	37.205	30.398
Kacang-Kacangan	10.085	11.936	14.041	11.618
Buah-Buahan	12.700	23.194	45.988	23.553
Minyak dan Kelapa	10.155	10.698	13.225	10.985
Bahan Minuman	12.266	16.291	21.743	15.773
Bumbu-Bumbuan	7.601	9.414	12.388	9.284
Bahan Makanan Lainnya	5.357	7.326	9.720	7.018
Makanan Minuman Jadi	81.646	171.996	286.869	158.872
Rokok dan Tembakau	34.728	66.845	103.367	61.320
Total Makanan	294.189	472.153	726.563	451.910

Sumber : Diolah dari Hasil Susenas

Peningkatan pendapatan idealnya diikuti dengan pemerataan pendapatan, karena pemerataan pendapatan merupakan salah satu strategi dan tujuan pembangunan nasional Indonesia. Ketimpangan dalam menikmati hasil pembangunan di antara kelompok penduduk dikhawatirkan akan menimbulkan masalah-masalah sosial. Tidak tersedianya data

pendapatan menyebabkan penghitungan distribusi pendapatan menggunakan data pengeluaran sebagai *proxy* pendapatan. Walaupun dilakukan dengan menggunakan pendekatan pengeluaran, paling tidak dapat digunakan sebagai petunjuk untuk melihat arah dari perkembangan yang terjadi.

**Tabel 5.3. Rata –rata Pengeluaran untuk Bukan Makanan PerKapita Sebulan Menurut Kelompok Pengeluaran dan Jenis Komoditas (Rupiah), 2017**

Jenis Komoditas	Kelompok Pengeluaran Perkapita Sebulan			
	40% Terbawah	40% Tengah	20% Teratas	Rata-rata
	Pengeluaran Perkapita Sebulan	Pengeluaran Perkapita Sebulan	Pengeluaran Perkapita Sebulan	Pengeluaran Perkapita Sebulan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Perumahan dan Fasilitas Rumah Tangga	89203	167852	415839	185924
Aneka Barang dan Jasa	36686	81279	231622	93466
Pakaian, Alas Kaki, dan Tutup Kepala	11778	23409	54201	24909
Barang Tahan Lama	6780	25404	232118	59180
Pajak, Pungutan dan Asuransi	12248	18603	49526	22233
Keperluan Pesta dan Upacara/Kenduri	3111	10940	65289	18651
<b>Total Bukan Makanan</b>	<b>159806</b>	<b>327488</b>	<b>1048596</b>	<b>404364</b>

Sumber: Diolah dari Hasil Susenas

**Tabel 5.4 Rata-rata Konsumsi Kalori Per kapita Sehari menurut Komoditas Makanan dan Kelompok Pengeluaran**

Jenis Komoditas	Kelompok Pengeluaran Per kapita Sebulan			
	40% Terbawah	40% Tengah	20% Teratas	Rata-rata
	Konsumsi Kalori Perkapita Sehari	Konsumsi Kalori Perkapita Sehari	Konsumsi Kalori Perkapita Sehari	Konsumsi Kalori Perkapita Sehari
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Padi-Padian	749,80	750,45	696,63	739,46
Umbi-Umbian	21,64	23,36	27,78	23,55
Ikan	34,82	48,31	60,11	45,28
Daging	30,21	45,02	57,85	41,67
Telur dan Susu	35,66	52,46	69,20	49,10
Sayur-Sayuran	34,31	37,70	40,58	36,92
Kacang-Kacangan	57,16	58,63	59,19	58,16
Buah-Buahan	36,09	50,56	70,97	48,86
Minyak dan Kelapa	194,55	206,75	237,10	207,93
Bahan Minuman	86,54	109,41	130,15	104,42
Bumbu-Bumbuan	17,02	18,82	21,44	18,62
Bahan Makanan Lainnya	36,28	44,97	54,85	43,48
Makanan Minuman Jadi	497,72	841,06	1068,41	749,49
Rokok dan Tembakau	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Makanan</b>	<b>1831,79</b>	<b>2287,50</b>	<b>2594,25</b>	<b>2166,96</b>

Sumber : Diolah dari Hasil Susenas

Tingkat kecukupan gizi yang mencakup konsumsi kalori dan protein merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk. Jumlah konsumsi kalori dan protein dihitung berdasarkan jumlah dari hasil kali antara kuantitas setiap makanan yang dikonsumsi dengan besarnya kandungan kalori dan protein dalam setiap makanan tersebut. Angka Kecukupan Gizi (AKG) yang dianjurkan adalah suatu kecukupan rata-rata zat gizi setiap hari bagi semua orang menurut golongan umur, jenis kelamin, ukuran tubuh, aktivitas tubuh untuk mencapai derajat kesehatan yang optimal. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 75 Tahun 2013 (Widya Karya Nasional

Pangan dan Gizi XI tahun 2012), rata-rata kecukupan energi dan protein bagi penduduk Indonesia masing-masing sebesar 2.150 kkal dan 57 gram protein.

Pada tahun 2017, rata-rata konsumsi kalori penduduk Kabupaten Batang sebesar 2.166,96 kkal. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata konsumsi kalori per hari penduduk Kabupaten Batang di Tahun 2017 sudah memenuhi syarat kecukupan gizi yang ditentukan. Sementara itu, rata-rata konsumsi protein per kapita penduduk Kabupaten Batang yaitu sebesar 67,98 gram pada tahun 2017. Kondisi ini menunjukkan kecukupan protein yang disyaratkan oleh Widya Karya Nasional Pangan dan Gizi yaitu 57 gram per hari telah terpenuhi penduduk Kabupaten Batang.

**Tabel 5.5. Rata-rata Konsumsi Protein Perkapita Sehari menurut Komoditas Makanan dan Kelompok Pengeluaran**

Jenis Komoditas	Kelompok Pengeluaran Perkapita Sebulan			
	40% Terbawah	40% Tengah	20% Teratas	Rata-rata
	Konsumsi Kalori Perkapita Sehari	Konsumsi Kalori Perkapita Sehari	Konsumsi Kalori Perkapita Sehari	Konsumsi Kalori Perkapita Sehari
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Padi-Padian	17,64	17,66	16,39	17,40
Umbi-Umbian	,20	,25	,30	,24
Ikan	5,62	7,85	9,97	7,38
Daging	1,87	2,82	3,67	2,61
Telur dan Susu	1,97	2,79	3,68	2,64
Sayur-Sayuran	2,06	2,23	2,23	2,16
Kacang-Kacangan	5,90	5,85	5,83	5,86
Buah-Buahan	,34	,47	,71	,47
Minyak dan Kelapa	,10	,13	,14	,12
Bahan Minuman	,58	,73	,96	,72
Bumbu-Bumbuan	,68	,76	,86	,75
Bahan Makanan Lainnya	,72	,89	1,00	,85
Makanan Minuman Jadi	14,36	31,32	42,51	26,79
Rokok dan Tembakau	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Makanan	52,04	73,74	88,25	67,98

Sumber: Diolah dari Hasil Susenas



## BAB 6. PERUMAHAN

---

Rumah dan kelengkapannya merupakan kebutuhan dasar dan juga merupakan faktor penentu indikator kesejahteraan rakyat. Rumah mempunyai pengaruh terhadap pembinaan watak dan kepribadian serta merupakan faktor penting terhadap produktivitas kerja dan kreativitas kerja seseorang. Selain itu rumah juga mempunyai fungsi strategis sebagai pusat pendidikan keluarga, persemaian budaya, dan peningkatan kualitas generasi yang akan datang. Dengan meningkatnya kualitas kehidupan yang layak dan bermartabat melalui pemenuhan kebutuhan papan maka akan terwujud kesejahteraan rakyat.

Rumah juga merupakan sarana pengamanan dan pemberi ketenteraman hidup bagi manusia. Dalam fungsinya sebagai pengamanan diri bukan berarti menutup diri tetapi harus membuka diri menyatu dengan lingkungannya. Kualitas lingkungan rumah tinggal mempengaruhi status kesehatan penghuninya. Kualitas rumah tinggal yang baik dalam lingkungan sehat, aman, lestari dan berkelanjutan ( Kepmen no.9 tahun 1999 ) diartikan sebagai suatu kondisi rumah yang memenuhi standar minimal dari segi kesehatan, sosial, budaya, ekonomi dan kualitas teknis.

Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang perumahan dan pemukiman sebagai pengganti dari Undang-Undang No. 4 tahun 1992 mencantumkan bahwa salah satu tujuan diselenggarakannya perumahan dan kawasan permukiman yaitu untuk menjamin terwujudnya rumah yang layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, teratur, terencana, terpadu, dan berkelanjutan. Definisi perumahan itu sendiri merupakan kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan fasilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni. Rumah selain sebagai tempat tinggal, juga dapat menunjukkan status sosial seseorang. Status sosial seseorang berhubungan positif dengan

kualitas/kondisi rumah. Semakin tinggi status sosial seseorang semakin besar peluang untuk memenuhi kebutuhan akan tempat tinggal dengan kualitas yang lebih baik.

Salah satu dari sekian banyak fasilitas yang dapat mencerminkan kesejahteraan rumah tangga adalah kualitas material seperti jenis atap, dinding dan lantai terluas yang digunakan, termasuk juga fasilitas penunjang lain yang meliputi luas lantai hunian, sumber air minum, fasilitas tempat buang air besar, dan sumber penerangan. Kualitas perumahan yang baik dan penggunaan fasilitas perumahan yang memadai akan memberikan kenyamanan bagi penghuninya.

## **KUALITAS RUMAH TINGGAL**

Rumah tinggal yang dapat dikategorikan ke dalam rumah yang layak huni sebagai tempat tinggal harus memenuhi beberapa kriteria kualitas rumah tempat tinggal. Beberapa diantaranya yaitu rumah yang memiliki dinding terluas yang terbuat dari tembok atau kayu, dengan beratapkan beton, genteng, sirap, seng maupun asbes, dan memiliki lantai terluas bukan tanah. Berdasarkan data Susenas 2017, persentase rumahtangga yang bertempat tinggal dirumah yang berlantai bukan tanah menunjukkan adanya peningkatan, walaupun peningkatan tersebut tidak terlalu tinggi. Pada tahun 2017, rumah yang berlantai bukan tanah sebesar 84,46 persen atau mengalami peningkatan bila dibandingkan pada tahun 2016 yang sebesar 80,95 persen. Jika dilihat menurut daerah tempat tinggal, walaupun sebagian besar rumah tangga sudah menghuni rumah dengan berlantai bukan tanah, namun di daerah perdesaan rumah tangga yang bertempat tinggal dirumah berlantai tanah masih dapat dikatakan lebih banyak dari pada di perkotaan.

**Tabel 6.1. Rumah Tangga Menurut Beberapa Indikator Kualitas Perumahan, 2015–2017**

Indikator Perumahan	Tahun		
	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)
Lantai Bukan Tanah (%)	80,18	80,95	84,46
Atap Beton, Genteng, Sirap, Seng, Esbes (%)	100,00	100,00	100,00
Dinding Terluas Tembok dan Kayu (%)	98,64	98,76	98,25

Sumber : Diolah dari Hasil Susenas

Indikator lain yang digunakan untuk melihat kualitas perumahan untuk rumah tinggal adalah penggunaan atap dan dinding terluas. Dari hasil Susenas 2015-2017 rumah tinggal dengan atap beton, genteng, sirap, seng dan asbes mencapai telah mencapai 100,00 persen. Sedangkan bangunan rumah tinggal yang menggunakan dinding terluas tembok dan kayu yang juga mengalami penurunan dari 98,64 persen tahun 2015 menjadi 98,25 persen pada tahun 2017.

Luas lantai rumah seringkali dianggap sebagai gambaran untuk menilai kemampuan sosial ekonomi masyarakat. Selain itu, luas lantai juga menentukan tingkat kesehatan penghuninya. Luas lantai yang sempit dapat mengurangi konsumsi oksigen penghuni rumah serta mempercepat proses penularan penyakit. Selama ini alat ukur yang dipakai adalah luas lantai per kapita, yaitu rata-rata luas lantai untuk setiap anggota rumah tangga atau dengan bahasa matematisnya adalah keseluruhan luas lantai dibagi total penduduk.

Menurut Kementerian Kesehatan, ukuran luas lantai yang ideal digunakan per orang minimal adalah 8 meter persegi, sedangkan menurut *World Health Organization* (WHO) serta *American Public Health Association* (APHA) yang telah disesuaikan dengan kondisi di Indonesia, ukuran luas lantai yang ideal digunakan per orang minimal adalah 10 meter persegi (BPS, 2015).

**Tabel 6.2. Persentase RumahTangga Menurut Luas Lantai Per Kapita, 2016 dan 2017**

Luas Lantai Hunian	2016		Total	2017		Klasifikasi Wilayah
	Klasifikasi Wilayah			Klasifikasi Wilayah		
	Perkotaann	Perdesaan		Perkotaann	perdesaan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
< 20	0,27	0,00	0,11	0,47	0,00	0,20
20-49	10,89	6,35	8,20	10,96	7,59	9,06
50-99	66,73	70,40	68,91	52,50	65,69	59,95
>100	22,10	23,25	22,78	36,07	26,72	30,79

Sumber : Diolah dari Hasil Susenas

Berdasarkan klasifikasi yang ditentukan oleh WHO, lebih dari 90 persen rumah tangga memiliki rumah dengan luas lantai perkapita minimal 10 m<sup>2</sup>. Selama dua tahun terakhir, persentase rumah tangga dengan luas lantai per kapita yang memenuhi standar WHO mengalami penurunan dari 99,89 persen pada tahun 2016 menjadi 99,80 persen pada tahun 2017. Penurunan persentase pada tahun 2017 disebabkan oleh meningkatnya jumlah penduduk tanpa diimbangi dengan kenaikan jumlah hunian. Jika dibandingkan berdasarkan daerah tempat tinggal, persentase rumah tangga dengan luas lantai perkapita minimal 10 m<sup>2</sup> di daerah perdesaan lebih tinggi dari pada daerah perkotaan. Hal ini disebabkan karena harga jual maupun sewa tanah dan bangunan di perdesaan lebih murah dibandingkan perkotaan, sehingga lebih memungkinkan penduduk perdesaan untuk mendapatkan hunian dengan luas yang layak.

## FASILITAS RUMAH TINGGAL

Kualitas dan kenyamanan rumah tinggal ditentukan oleh kelengkapan fasilitas suatu rumah tinggal. Yang termasuk dalam kelengkapan fasilitas tersebut adalah tersedianya air bersih, sanitasi yang layak, serta penerangan yang baik. Air bersih merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi rumah tangga dalam kehidupan sehari-hari. Ketersediaan dalam jumlah yang cukup terutama untuk keperluan minum dan masak merupakan tujuan dari program penyediaan air bersih yang terus menerus diupayakan pemerintah.

Fasilitas perumahan yang penting adalah penerangan. Sumber penerangan yang ideal adalah yang berasal dari listrik (PLN dan Non-PLN), karena cahaya listrik lebih terang dibandingkan sumber penerangan lainnya. Berdasarkan hasil Susenas tahun 2017, sebanyak 100,00 persen rumah tangga telah menikmati fasilitas penerangan listrik, meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2016 (99,84 persen). Jika dilihat berdasarkan daerah tempat tinggal, pada tahun 2016, rumah tangga yang menggunakan listrik di perkotaan sebanyak 100,00 persen, sementara di daerah perdesaan sebanyak 99,74 persen (Tabel 6.3) dan tahun 2017 baik di perkotaan dan di perdesaan rumahtangga telah 100,00 persen menikmati listrik.

Pada tahun 2017, rumah tangga di Kabupaten Batang yang menggunakan air kemasan, air isi ulang, dan air leding sebagai sumber air minum dan masak mencapai 21,93 persen. Terlihat perbedaan yang sangat signifikan bila dibedakan menurut daerah tempat tinggal. Pola penggunaan atau konsumsi air penduduk perkotaan sangat jauh berbeda dengan gaya hidup penduduk yang tinggal di perdesaan. Hal ini terlihat dari rumah tangga di daerah perkotaan dalam mengkonsumsi air kemasan, air isi ulang dan air dari leding yang mencapai 28,70 persen, sementara di perdesaan hanya 16,72 persen.

**Tabel 6.3. Persentase Rumah Tangga Menurut Beberapa Fasilitas Perumahan, 2016 –2017**

Fasilitas Perumahan	2016			2017		
	Klasifikasi Wilayah		Total	Klasifikasi Wilayah		Total
	Perkotaan	Perdesaan		Perkotaan	Perdesaan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Penerangan Listrik	100,00	99,74	99,84	100,00	100,00	100,00
Air Minum Kemasan/Isi Ulang/Leding	45,83	12,96	26,37	28,70	16,72	21,93
Pembuangan Akhir Tempat Tinja	70,83	36,82	50,69	88,36	66,90	75,33

Sumber : Diolah dari Hasil Susenas

Penyediaan sarana jamban merupakan bagian dari usaha sanitasi yang cukup penting peranannya. Jika ditinjau dari sudut kesehatan lingkungan, pembuangan kotoran

manusia yang tidak “saniter” akan mencemari lingkungan terutama tanah dan sumber air. Selain itu juga menyebabkan berbagai macam penyakit seperti *thypus*, disentri, kolera, dan sebagainya. Untuk mencegah dan mengurangi kontaminasi terhadap lingkungan maka pembuangan kotoran manusia harus dikelola dengan baik sesuai dengan ketentuan jamban yang sehat. Fasilitas rumah tinggal yang berkaitan dengan hal tersebut adalah ketersediaan jamban sendiri dengan tangki septik.

Teknologi pembuangan kotoran manusia untuk daerah perdesaan berbeda dengan teknologi jamban di daerah perkotaan. Selama tahun 2016-2017 persentase rumah tangga yang memiliki jamban sendiri dengan septiktank menunjukkan tren peningkatan baik di daerah perkotaan maupun di perdesaan. Peningkatan di perdesaan terlihat lebih dalam dibandingkan perkotaan. Hal ini perlu untuk diperhatikan secara lebih mendalam karena kemungkinan rumah tangga di perkotaan menggunakan jamban namun bukan milik sendiri.

## STATUS KEPEMILIKAN RUMAH TINGGAL

Salah satu indikator yang digunakan untuk melihat tingkat kesejahteraan dan juga peningkatan taraf hidup masyarakat adalah status kepemilikan rumah tinggal. Kondisi ekonomi rumah tangga sangat berpengaruh terhadap kepemilikan rumah tinggal. Status kepemilikan rumah tinggal yang dicakup di sini adalah rumah milik sendiri, kontrak, sewa, bebas sewa, rumah dinas, rumah milik orangtua/saudara atau status kepemilikan lainnya. Rumah tangga yang menempati rumah milik sendiri dapat dikatakan telah mampu memenuhi kebutuhan akan tempat tinggal yang terjamin dan permanen dalam jangka panjang.

**Tabel 6.4. Persentase Rumah Tangga Menurut Status Kepemilikan Rumah Tinggal, 2016–2017**

Fasilitas Perumahan	2016		Total	2017		Klasifikasi Wilayah
	Klasifikasi Wilayah			Klasifikasi Wilayah		
	Perkotaan	Perdesaan		Perkotaan	Perdesaan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Milik sendiri	96,71	97,01	96,89	88,13	96,61	92,92
Kontrak/sewa	0,85	0,55	0,67	1,59	0,60	1,03
Bebas sewa	2,45	2,33	2,38	10,28	2,60	5,94
Dinas	0,00	0,10	0,06	0,00	0,19	0,11

Sumber: Diolah dari Hasil Susenas

Berdasarkan hasil Susenas 2017, rumah tangga yang menempati rumah milik sendiri sebesar 92,92 persen, sisanya 7,08 persen adalah bukan milik sendiri. Rumah tangga yang menempati rumah bukan milik sendiri terdiri dari 1,03 persen kontrak/sewa, sedangkan rumahtangga yang tinggal bebas sewa/rumah dinas/lainnya sebanyak 6,05 persen. Kepemilikan rumah tinggal milik sendiri di perkotaan lebih rendah bila dibandingkan dengan perdesaan yaitu 82,26 persen di perkotaan dan 93,47 persen di perdesaan. Hal ini dimungkinkan karena harga jual rumah di daerah perkotaan lebih mahal dari pada di perdesaan sehingga banyak penduduk yang mengontrak, sewa atau menempati rumah milik orang tua/saudara.





## BAB 7. KEMISKINAN

---

Pembangunan pada dasarnya bertujuan menciptakan kemakmuran dan mengurangi kemiskinan. Kemiskinan merupakan ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan makanan dan bukan makanan yang diukur dari pengeluaran (BPS). Kemiskinan merupakan masalah multidimensi, yang bukan hanya mencakup kondisi ekonomi tetapi juga sosial, budaya, dan politik. Kemiskinan menjadi masalah utama yang terjadi di setiap daerah, termasuk Kabupaten Batang.

Kemiskinan disuatu wilayah dapat dijelaskan melalui beberapa indikator antara lain jumlah penduduk miskin, persentase penduduk miskin, garis kemiskinan, indeks kedalaman kemiskinan, indeks keparahan kemiskinan, serta karakteristik penduduk miskin itu sendiri berdasarkan fasilitas tempat tinggal, tingkat pendidikan, status pekerjaan, status kesehatan dan lainnya.

### PERKEMBANGAN PENDUDUK MISKIN

Selama periode 2015-2017, penduduk miskin di Kabupaten Batang menunjukkan tren penurunan baik dari sisi jumlah maupun persentasenya. Hal ini tentunya menjadi sesuatu yang menggembirakan meskipun para pemangku kebijakan terlihat belum “puas” dengan capaian tersebut. Penurunan kemiskinan konsisten terjadi baik di perkotaan maupun perdesaan. Meskipun jumlah penduduk miskin lebih besar di perdesaan dibanding perkotaan, namun penurunan kemiskinan tahun 2017 lebih banyak dibandingkan di perkotaan. Untuk menganalisis kemiskinan lebih lanjut, perlu dilihat besaran lain seperti garis kemiskinan (GK), tingkat kedalaman kemiskinan (P1), dan tingkat keparahan kemiskinan (P2) yang akan dibahas pada subbab berikutnya.

**Tabel 7.1 Jumlah Penduduk Miskin dan Persentase Penduduk Miskin, 2014-2017**

Tahun	Penduduk Miskin	Persentase Penduduk Miskin
(1)	(3)	(4)
2014	82.120	11,13
2015	83.530	11,27
2016	82.560	11,04
2017	81.500	10,80

Sumber: KBDA KAB. Batang 2018

## GARIS KEMISKINAN (GK), INDEKS KEDALAMAN KEMISKINAN (P<sub>1</sub>), INDEKS KEPARAHAN KEMISKINAN (P<sub>2</sub>)

Garis Kemiskinan digunakan sebagai batas untuk mengelompokkan penduduk miskin dan tidak miskin. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perbulan di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan di Kabupaten Batang mengalami peningkatan secara bertahap dari tahun 2014 hingga 2017. Pada tahun 2014, garis kemiskinan di Kabupaten Batang sebesar Rp.216.952,00 kemudian meningkat menjadi Rp.224.437,00 pada tahun 2015, meningkat lagi menjadi Rp.240.541,00 pada tahun 2016, hingga kemudian menjadi Rp. 249.292,00 pada tahun 2017. Meningkatnya garis kemiskinan dipengaruhi oleh meningkatnya gaya hidup penduduk serta meningkatnya harga kebutuhan pokok dari tahun ke tahun.

**Tabel 7.2. Garis Kemiskinan, Indeks Kedalaman Kemiskinan, dan Indeks Keparahan Kemiskinan, 2014-2017 (Rp/Kapita/Bulan)**

Indikator Kemiskinan	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Garis Kemiskinan	216.952	224.437	240.541	249.292
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P <sub>1</sub> )	1.43	1.80	1.65	1.51
Indeks Keparahan Kemiskinan (P <sub>2</sub> )	0.29	0.43	0.39	0.31

Sumber: KBDA KAB. Batang 2018

Indeks kedalaman kemiskinan (P1) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Perkembangan indeks kedalaman kemiskinan di Kabupaten Batang selama periode 2014 hingga 2017 cukup menggembirakan. Selama tiga tahun terakhir, tingkat kedalaman kemiskinan mengalami penurunan. Bahkan pada tahun 2017, penurunan P1 lebih besar dibandingkan dengan penurunan P1 pada tahun 2016.

Indeks keparahan kemiskinan (P2) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin. Tak berbeda jauh dengan P1, P2 juga mengalami penurunan selama empat tahun terakhir. Penurunan ditahun 2017 juga lebih besar dibandingkan penurunan pada periode sebelumnya.

Meskipun beberapa indikator kemiskinan menunjukkan hasil yang menggembirakan, namun masih perlu upaya penanggulangan kemiskinan yang lebih diprioritaskan di daerah pedesaan untuk dapat membebaskan penduduk dengan kondisi miskin “terlalu dalam dan terlalu parah”. Terlebih dikarenakan target kemiskinan sesuai RPJMD belum dapat dipenuhi. Selain indikator garis kemiskinan, indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan, karakteristik rumah tangga miskin dapat dilihat dari kondisi demografi, pendidikan dan ketenagakerjaan dari kepala rumah tangga, dan kondisi perumahan. Pemahaman mengenai karakteristik rumah tangga miskin penting sebagai dasar dalam penyusunan kebijakan dan program pengentasan kemiskinan agar tepat sasaran.



# KESIMPULAN

Kabupaten Batang merupakan kabupaten dengan jumlah penduduk yang didominasi oleh penduduk bermata pencaharian pertanian. Dalam lima tahun terakhir, angka ketergantungan penduduk mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Pertumbuhan jumlah penduduk produktif (15-64 tahun) lebih tinggi dibandingkan jumlah penduduk non produktif (0-14 tahun dan 65+ tahun). Kondisi tersebut disebut dengan bonus demografi dimana jumlah penduduk produktif semakin banyak dan jumlah penduduk non produktif semakin berkurang. Bonus demografi tersebut akan menjadi keuntungan bagi suatu daerah jika penduduk produktif yang ada adalah penduduk yang berkualitas.

Salah satu indikator untuk mengukur kualitas sumber daya manusia adalah tingkat pendidikan. Selama lima tahun terakhir, kualitas pendidikan di Kabupaten Batang yang diukur berdasarkan indikator seperti Rata-Rata Lama Sekolah (RLS), Harapan Lama Sekolah (HLS), Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Murni (APM) mengalami peningkatan seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk yang produktif.

Mulai tahun 2015, terjadi pergeseran persentase lapangan usaha utama dari pertanian menjadi industri. Pergeseran ini didorong oleh semakin sempitnya lahan pertanian di Kabupaten Batang dan juga ketertarikan penduduk pada lapangan usaha ini mulai menurun yang mengakibatkan menurunnya produktifitas hasil pertanian. Menurunnya ketertarikan pada lapangan usaha pertanian disebabkan oleh banyak hal antara lain tingkat pendidikan yang semakin tinggi yang mendorong angkatan kerja untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dengan upah/keuntungan lebih tinggi yang saat ini banyak ditawarkan oleh kategori industri.

Rumah tangga dikatakan sejahtera jika persentase pengeluaran untuk makanan jauh lebih kecil dibandingkan untuk non makanan. Pada tahun 2017, pola pengeluaran

kembali didominasi oleh pengeluaran makanan setelah sebelumnya sempat diungguli oleh pengeluaran non-makanan. Pengeluaran untuk non-makanan semakin meningkat seiring dengan meningkatnya kelompok pengeluaran. Jika dilihat dari sisi makanan, konsumsi kalori penduduk Kabupaten Batang belum mencukupi standar kecukupan kalori, namun asupan protein telah memenuhi yang disyaratkan oleh Widya Karya Nasional Pangan & Gizi.

Membaiknya pendapatan penduduk berdampak pula pada membaiknya kualitas perumahan yang dapat dilihat dari meningkatnya persentase lantai bukan tanah, penggunaan atap beton maupun genteng, penggunaan dinding tembok dan kayu, penggunaan air bersih, penggunaan listrik, penggunaan jamban sendiri, dll. Selain berdasarkan kualitas perumahan, kepemilikan rumah milik sendiripun semakin meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini didukung dengan upaya pemerintah membangun rumah sederhana ditambah dengan dukungan perbankan yang semakin menekan bunga KPR. Data tiga tahun terakhir menunjukkan bahwa lebih dari 98 persen rumah tangga di Kabupaten Batang telah memiliki fasilitas perumahan dengan luasan minimal 10 m<sup>2</sup> perkapita, yang mana hal ini sudah sesuai dengan standar minimal dari *World Health Organization* (WHO) serta *American Public Health Association* (APHA).

Meningkatnya presentase konsumsi non makanan, membaiknya kualitas pendidikan dan perumahan dapat menjadi indikator meningkatnya kesejahteraan penduduk dan berkurangnya kemiskinan di Kabupaten Batang. Akan tetapi yang perlu diwaspadai adalah meningkatnya indeks kedalaman serta keparahan kemiskinan. Indeks kedalaman kemiskinan menggambarkan bahwa masih terdapat penduduk miskin dengan pengeluaran yang jauh dibawah garis kemiskinan. Sementara itu, indeks keparahan kemiskinan menggambarkan masih ada ketimpangan pengeluaran antar penduduk miskin itu sendiri. Meskipun begitu, berdasarkan karakteristik pendidikan dan kualitas perumahan, kondisi penduduk miskin terus membaik dari tahun ke tahun.



# DAFTAR PUSTAKA

## DAFTAR PUSTAKA

Berita Resmi Statistik Kemiskinan

Berita Resmi Statistik Kemiskinan Provinsi Jawa Tengah Maret 2018.

PS,2016. *Indikator Kesejahteraan Rakyat 2016*.Jakarta.

BPS Prov. Jateng, 2017.*Statistik Kesejahteraan Prov. Jateng 2017*.Semarang.

BPS Kabupaten Batang, 2017.*Profil Kesehatan Kabupaten Batang 2017*.Batang.

BPS Kabupaten Batang, 2017. *Kabupaten Batang Dalam Data 2018*. Batang 2018. Batang,2018.

*Profil Kesehatan Jawa Tengah 2016*. Semarang.

BPS Provinsi Jawa Tengah, 2016.*Statistik Pendidikan Jawa Tengah 2016*.Semarang.

BPS Kabupaten Batang, 2017. *Keadaan Angkatan Kerja JawaTengah, Agustus 2017*.Batang.BPS

Kabupaten Batang, 2016. *Keadaan Angkatan Kerja JawaTengah, Agustus2016*.Batang

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2015. *Statistik Sekolah Dasar (SD)2014/2015*. Jakarta.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2016. *Statistik Sekolah Dasar (SD)2015/2016*. Jakarta.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.2017.*Ikhtisar Data*

*Pendidikan dan Kebudayaan2016/17*.Jakarta.Kementerian Pendidikan dan

Kebudayaan.2018.*IkhtisarData Pendidikan dan Kebudayaan 2017/18*. Jakarta.





<https://batangkab.bpt.go.id>

**Tabel 1.1. Jumlah, Laju Pertumbuhan Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Kabupaten Batang, 2013-2017**

Tahun	Jumlah Penduduk	Laju Pertumbuhan	Rasio Jenis Kelamin
(1)	(2)	(3)	(4)
2013	729.591	0,97	99,77
2014	736.497	0,95	99,74
2015	743.090	0,9	99,75
2016	749.720	0,89	99,74
2017	756.079	0,85	99,71

Sumber: Proyeksi Penduduk Kabupaten Kabupaten Batang 2010-2020

**Tabel 1.2. Kepadatan Penduduk Menurut Tahun di Kab. Batang, Tahun 2013-2017**

Tahun	Jumlah Penduduk (jiwa)	Luas Wilayah (km)	Kepadatan (km <sup>2</sup> )
(1)	(2)	(3)	(4)
2013	729.591	788,64	925
2014	736.497	788,64	934
2015	743.090	788,64	942
2016	749.720	788,64	951
2017	756.079	788,64	959

Sumber : Proyeksi Penduduk Kabupaten Batang 2010-2020

**Tabel 1.3 Komposisi Penduduk dan Angka Beban Ketergantungan, 2013-2017**

Tahun	0-14 thn	65+ thn	15-64 thn	Jumlah	Angka Beban Ketergantungan (Jiwa)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2013	185.922	44.801	498.868	729.591	46,25
2014	185.378	46.253	504.866	736.497	45,88
2015	184.794	47.869	510.427	743.090	45,58
2016	184.173	49.642	515.905	749.720	45,32
2017	183.518	51.578	520.983	756.079	45,13

**Tabel 1.4 Persentase Wanita Umur10+ Tahun Pernah Kawin Menurut Usia Perkawinan Pertama, 2016 dan 2017**

Umur perkawinan pertama	Perkotaan		Perdesaan		Perkotaan+Perdesaan	
	2016	2017	2016	2017	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
< 17	8,27	10,55	14,10	23,49	11,76	18,00
17-18	14,11	26,20	17,81	24,88	16,32	25,44
19-24	44,98	49,22	44,71	38,21	44,82	42,89
25+	32,64	14,02	23,38	13,42	27,11	13,68

Sumber : Susenas 2017

**Tabel 2.1 Angka Kesakitan dan Rata-rata Lamanya Sakit, 2016 dan 2017**

Tahun	Angka Kesakitan (%)			Rata-rata Lama Sakit (hari)		
	Laki-laki	Perempuan	Total	Laki-laki	Perempuan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2016	14,04	15,38	14,71	5,28	5,14	5,21
2017	17,12	16,15	16,64	1,12	0,96	1,04

Sumber: Diolah dari Hasil Susenas

**Tabel 2.2 Persentase Anak Usia Kurang dari 2 tahun yang Pernah Disusui dan Lamanya Disusui, Kabupaten Batang 2016 dan 2017**

Tahun	Anak Usia kurang 2 Tahun yang pernah Disusui	Rata-rata Lama Disusui (bln)	Asi Eksklusif (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
2016	97,51	9,87	55,96
2017	93,82	0,3	56,63

Sumber: Diolah dari Hasil Susenas

# DATA

## MENCERDASKAN BANGSA

— *Enlighten The Nation* —



**BADAN PUSAT STATISTIK  
KABUPATEN BATANG**

Jalan Pemuda No. 90 Batang 51215  
Telp/Fax (0285) 391004

Homepage: <https://batangkab.bps.go.id> Email: [bps3325@bps.go.id](mailto:bps3325@bps.go.id)

ISBN 978-602-6375-65-0

